

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan di desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa memiliki peran yang cukup penting dalam proyek pembangunan nasional. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa yang maju dan mandiri. Keberhasilan pembangunan di desa, semata-mata bukan hanya ditentukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang ada di tingkat pusat tetapi juga kebijakan yang diimplementasikan pada tingkat Provinsi, Kabupaten Daerah tingkat II, sampai ke Kecamatan dan Desa.¹

Hal tersebut sesuai dengan poin ketiga Program Nawacita Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.” Pada poin ketiga tersebut memiliki maksud bahwa adanya pembangunan dari pinggiran memiliki semangat ekonomi yang tinggi sebab, dengan adanya pembangunan di daerah-daerah, maka pola distribusi pasti akan berubah. Pola distribusi yang semula menitikberatkan distribusi dari pusat ke daerah menjadi distribusi dari daerah ke pusat, sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah dan dapat mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan sila kelima dalam Pancasila.²

Pembangunan di desa bukan hanya mengenai pembangunan infrastruktur, tetapi mencakup berbagai sektor seperti, pendidikan, ekonomi, sosial-budaya serta yang tidak kalah penting yaitu pembangunan di sektor pariwisata. Pembangunan

¹Tumbel Meiske Tinneke. (2014). *Analisis Bantuan Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Tareeran Kabupaten Minahasa Selatan)*. Volume 1 Nomor 2. Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum .Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi.

²Noer Mohammad , Soleman Mochdar. (2017). *Nawacita Sebagai Strategi Khusus Jokowi Periode Oktober 2014-20 Oktober 2015*. Vol. 13 No. 1. Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan. Universitas Nasional.

di sektor pariwisata dilakukan melalui strategi pengembangan pariwisata desa. Pengembangan sektor ini dianggap andalan utama sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga devisa negara. Bukan hanya sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau devisa negara, tetapi melalui pengembangan pariwisata juga memiliki peran sebagai perluasan lapangan pekerjaan dan memperkenalkan kebudayaan daerahnya yang beranekaragam secara tidak langsung.

Pariwisata telah tumbuh sebagai industri yang menguntungkan dan memiliki prospek masa depan yang cerah bagi sebuah pembangunan. Secara politis telah disadari oleh pemerintah bahwa pariwisata adalah peluang bisnis untuk menyumbang Pendapatan Asli Desa (PAD) bahkan devisa negara, menciptakan lapangan kerja, menciptakan kesempatan berwirausaha, menumbuhkan kecintaan terhadap kebudayaan dan kesenian serta yang paling utama tujuan dari ditingkatkannya pengembangan pariwisata adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air terhadap budaya dan kearifan lokal dari budaya setempat bagi wisatawan. Hal tersebut juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 pasal 2 ayat 6 yang menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berorientasi upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan serta pelestarian lingkungan.³ Artinya, sektor pariwisata secara tidak langsung mampu mempercepat perekonomian di daerah bahkan negara. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata terus menerus melaksanakan pengembangan pada sektor pariwisata. Pembangunan sektor pariwisata di Indonesia dinilai cukup berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kunjungan wisatawan mancanegara dari tahun ke tahun yang mengalami peningkatan. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

³Sastrayuda, Gumelar S. (2010). *Konsep Pengembangan Kawasan Agrowisata. Hand Out Mata Kuliah Concept Resort And Leisure, Strategi Pengembangan Dan Pengelolaan Resort And Leisure*. Diakses melalui <http://file.upi.edu/direktori/fpips.pdf>

Tabel 1.1 Tingkat Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia tahun 2000-2017

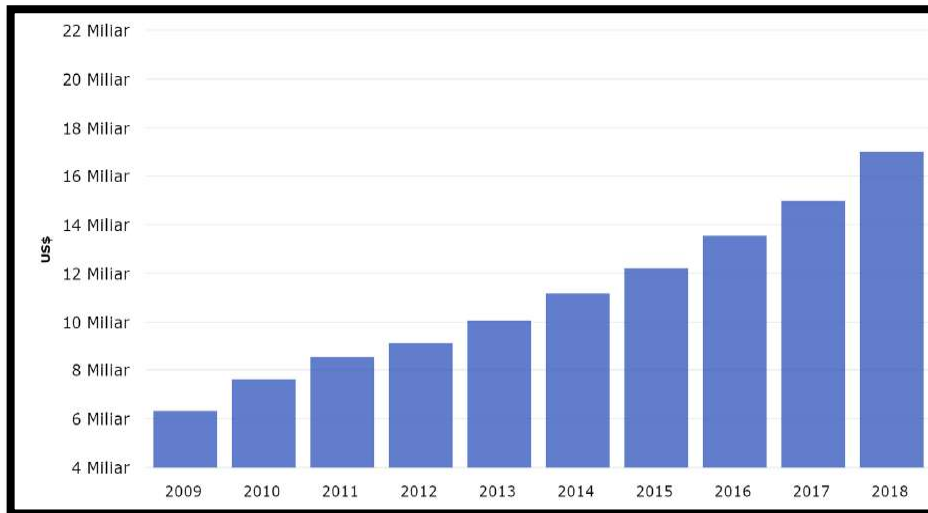
Tahun	Jumlah Wisatawan mancanegara
2005	5.002.101
2006	4.871.351
2007	5,505.759
2008	6,234.497
2009	6,323,730
2010	7,002,944
2011	7,649,731
2012	8,044,462
2013	8,802,129
2014	9,435,411
2015	10,230,775
2016	11,519,275
2017	14,039,799

Sumber: www.bps.go.id (diakses pada tanggal 6 Maret 2019 pukul 21.37 WIB)

Dari tabel diatas terlihat bahwa pencapaian wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di atas bahwa pada tahun 2015 wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia sebanyak 10.230.775 orang, kemudian pada tahun 2016 menjadi naik pada angka 11.519.275Juta orang dan pada tahun 2017 jumlah wisatawan yang datang sebanyak 14.039.799 juta orang meleset 7% dari target Kementerian Pariwisata yang menargetkan sebanyak 15 Juta orang wisatawan mancanegara.

Kontribusi pariwisata Indonesia terhadap devisa negara begitu besar, hal tersebut didukung oleh tingkat pertumbuhan wisatawan mancanegara maupun domestik yang naik dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata, pertumbuhan devisa dari sektor Pariwisata mengalami peningkatan

yang konsisten dan berkelanjutan sejak tahun 2009 yang ditunjukkan pada grafik berikut.



Gambar 1.1 Pertumbuhan Devisa dari Sektor Pariwisata Indonesia tahun 2009-2018

Sumber: <http://www.kemenpar.go.id/> (diakses pada tanggal 6 Maret 2019 pukul 22.52 WIB)

Berdasarkan data grafik di atas, pertumbuhan devisa dari sektor pariwisata dari tahun 2009 terus mengalami kenaikan yang signifikan. Kontribusi sektor pariwisata terhadap devisa negara selama empat belas tahun meningkat hampir mencapai seratus persen. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2009, kontribusi sektor pariwisata terhadap devisa negara adalah sebesar 6 Miliar USD, sedangkan pada tahun 2014 kontribusi sektor pariwisata terhadap devisa negara mencapai 12 Miliar USD dan pada tahun 2018 kontribusi sektor pariwisata terhadap devisa negara adalah sebesar 16 Miliar USD. Data grafik di atas menunjukkan keberhasilan pengembangan pada sektor pariwisata dengan didorong adanya peningkatan kualitas dan akses menuju destinasi, penguatan data dan informasi serta peningkatan atraksi yang terintegrasi bisa menjadi alternatif untuk meningkatkan devisa pariwisata nasional.

Salah satu provinsi yang memiliki destinasi pariwisata yang cukup beragam adalah Provinsi Jawa Tengah. Pariwisata di Jawa Tengah dinilai cukup

berhasil berdasarkan kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun yang selalu mengalami peningkatan secara konsisten. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2 Kunjungan Wisatawan Di Jawa Tengah tahun 2011-2016 (Juta Orang)

Tahun/ Year	Wisatawan/ Visitors		Jumlah/ Total
	Mancanegara/ International	Domestic/ Domestic	
2011	392.895	21.838.351	22.231.246
2012	372.463	25.240.021	25.612.484
2013	388.143	29.430.609	29.818.752
2014	419.584	29.852.095	30.271.679
2015	375.166	31.432.080	31.807.246
2016	578.924	36.899.776	37.478.700
Jumlah	2.527.175	174.692.932	177.220.107

Sumber: <https://jateng.bps.go.id/> (diakses pada tanggal 7 Maret 2019 pukul 01.07 WIB)

Apabila dilihat dari tabel diatas, perkembangan wisatawan domestik maupun mancanegara mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal tersebut memiliki dampak positif bagi pariwisata yang ada di Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah memiliki banyak potensi wisata yang menjadi daya tarik para wisatawan yang tentunya tidak kalah dengan provinsi lain seperti Yogyakarta, Bali, dan Jakarta.

Salah satu daerah di Jawa Tengah yang saat ini terkenal dengan destinasi wisata airnya adalah Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten merupakan daerah yang memiliki keindahan dan potensi wisata yang begitu banyak diantaranya terdapat beberapa wisata seperti Wisata Alam, Wisata Buatan, Wisata Religi, Wisata Peninggalan Sejarah, Wisata Kerajinan, Wisata Budaya, dan Wisata Desa.⁴

⁴ Sari,Rizky Danar Novita. 2016. *Pengaruh Objek Wisata Air Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Usaha (Studi Kasus Objek Mata Air Cokro Dan Umbul Ponggok Kabupaten Klaten)*. Jogjakarta : Universitas islam negeri sunan kalijaga.

Berikut ini merupakan beberapa wisata yang menjadi daya tarik wisatawan yang dimiliki oleh Kabupaten Klaten.

Tabel 1.3 Destinasi Wisata yang ada di Kabupaten Klaten

NO	Obyek Wisata	Lokasi	Jenis Wisata
1	Umbul Ponggok	Kec. Polanharjo	Wisata Alam
2	Umbul Buto	Kedungan, Pedan	Wisata Alam
3	Umbul Tirtomoyo	Kedungan, Pedan	Wisata Alam
4	Goa Jepang	Kec. Kemalang	Wisata Alam
5	Goa Jetis	Kec. Jatinom	Wisata Alam
6	Museum Gula Gondang Winangoen	Desa Gondawinangun, Kec. Jogonalan	Wisata Buatan
7	Monumen Juang '45	Ds. Jonggrangan, Klaten utara	Wisata Buatan
8	Agrowisata rambutan	Ds. Tulung Kec. Tulung	Wisata Buatan
9	Taman Bukit Sidagora	Desa Krakitan Kecamatan Bayat	Wisata Buatan
10	Monumen Nartosabdo	Kel. Tonggalan Kec. Klaten Tengah	Wisata Buatan
11	Kolam Renang dan Arena Bermain Tirto Raharja	Ds. Ponggok Kec. Polanharjo	Wisata Buatan
12	Taman Wisata Candi Prambanan	Dk. Ngringin Ds. Tlogo Kec. Prambanan	Wisata Sejarah
13	Candi Sojiwan	Ds. Kebondalem Kidul Kec. Prambanan	Wisata Sejarah
14	Candi Merak	Ds. Karangnongko	Wisata Sejarah
15	Candi Plaosan Lor	Dk. Plaosan Ds. Bugisan Kec. Prambanan	Wisata Sejarah
16	Masjid Sorowaden	Desa Kahuman Kec. Ngawen	Wisata Ziarah
17	Pesanggrahan Pakoe Boewono X	Dk. Deles Desa Sidorejo Kecamatan Kemalang	Wisata Ziarah
18	Makam Kyai Ageng Syarifuddin	Kel. Belangwetan Kec. Klaten Utara	Wisata Ziarah

Sumber: <http://pariwisataklaten.id/> (diolah oleh peneliti tahun 2019)

Pengembangan potensi wisata yang ada di Kabupaten Klaten sebagai destinasi wisata selama beberapa tahun terakhir begitu berkembang pesat. Jenis destinasi wisata yang ditawarkan juga beragam. Tidak salah apabila pada beberapa tahun terakhir, tingkat pengunjung wisata yang mengunjungi wisata-wisata yang ada di Kabupaten Klaten pun mengalami kenaikan. Berikut adalah

data jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Klaten pada tahun 2014-2015.

Tabel 1.4 Data Pengunjung Objek Wisata Di Kabupaten Klaten tahun 2014-2015

No	Jenis Wisata	Nama Wisata	Tahun	
			2014	2015
1	Wisata Budaya	Candi Plasoan	3.667	2.586
2	Wisata Budaya	Makam Ki Ageng Gribig	1.300	1.000
3	Wisata Budaya	Makam Padanaran	162.900	152.300
4	Wisata Budaya	Makam Perwito	-	-
5	Wisata Budaya	Makam Ronggowarsito	1.596	1.880
6	Wisata Alam	Umbul Ponggok	167.445	367.000
7	Wisata Alam	Deles Indah	6.250	6.250
8	Wisata Alam	Umbul Cokro	45.749	53.360
9	Wisata Alam	Jombor Permai	28.910	27.282
10	Wisata Alam	Pemandian Jolotundo	8.840	8.807
11	Lain-Lain	Event Maleman	26.100	40.000
12	Lain-Lain	Event Padusan	5.750	5476
13	Lain-Lain	Event Syawalan	18.800	18.800
14	Lain-Lain	Event Yaqowiyu	11.000	11.500
Total			488.307	696.241

Sumber: <https://klatenkab.bps.go.id> (diolah oleh peneliti pada tahun 2019)

Apabila melihat data di atas, wisata Umbul Ponggok menempati peringkat pertama dengan tingkat pengunjung wisatawan yang berkunjung sebanyak 167.445 ribu orang pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan begitu pesat sebanyak 367.000 ribu orang, Kemudian, di posisi kedua ditempati wisata Makam Padanaran dengan jumlah pengunjung sebanyak 162.900 pada tahun 2014 dan mengalami penurunan pada tahun 2015 sebanyak 152.300 pengunjung. Pada posisi ketiga ditempati wisata Umbul Cokro dengan pengunjung sebanyak 45.749 pada tahun 2014 dan mengalami peningkatan sebanyak 53.360 pada tahun 2015.

Desa Ponggok terletak di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Desa yang dahulunya merupakan kawasan industri Pabrik Gula Ponggok (*Suikerfabriek* Ponggok). Sekitar tahun 1930-an karena kondisi

ekonomi, sosial politik dunia sedang krisis dan masa perjuangan Indonesia membawa dampak kemunduran bagi Pabrik Gula Ponggok akhirnya operasional pabrik gula ditutup. Diantara peninggalan kejayaan Pabrik Gula Ponggok yang sekarang masih ada adalah Umbul Ponggok.

Dahulu Umbul Ponggok adalah mata air yang dijadikan sebuah *water reservoir* yang berfungsi sebagai tampungan air untuk kebutuhan operasional Pabrik Gula Ponggok dan Pabrik Gula Karangnom, selain itu juga digunakan untuk pengairan perkebunan tebu untuk pengairan perkebunan tebu di wilayah Polanharjo, Karangnom dan Ceper. Setelah pabrik gula tidak beroperasi lagi, keberadaan *water reservoir* Ponggok masih difungsikan sebagai pengairan sawah dan perkebunan sampai sekarang.⁵ Seiring dengan perkembangan zaman, Pemerintah Desa Ponggok bersama masyarakat kemudian mengembangkan potensi yang dimiliki Ponggok untuk diubah menjadi objek wisata yang unik dengan tema *snorkling, diving* dan foto *underwater*.

Selain Umbul Ponggok terdapat beberapa sumber air atau umbul yang ada di Desa Ponggok diantaranya ada Umbul Sigedang, Umbul Cokro, Umbul Kapiler, Umbul Ponggok, dan Umbul Besuki.⁶ Pada setiap umbul tersebut dapat kita jumpai pemandangan alam yang indah serta air yang jernih, didukung dengan suasana desa yang asri, maka sangat sesuai jika desa ini dikembangkan menjadi sebuah desa wisata oleh pemerintah Kabupaten Klaten khususnya Pemerintah Desa Ponggok.

Dari kekayaan alam tersebut, Desa Ponggok mengembangkannya menjadi desa wisata dengan berbagai destinasi. Salah satunya destinasinya adalah objek wisata Umbul Ponggok. Objek Wisata Umbul Ponggok adalah salah satu mata air yang ada di Klaten yang dijadikan sebagai objek wisata. Bukan hanya sebuah mata air yang jernih, objek Wisata Umbul Ponggok ini memiliki keunikan

⁵ Tifana, Ridho Nursinggih. (2017). *Analisis Kepuasan Pengunjung Objek Wisata Umbul Ponggok Klaten Ditinjau Dari Kualitas Pelayanan, Harga, Dan Promosi*. Undergraduate Thesis, Faculty Of Social And Political Science.

⁶ Fatmawati, Eko Nur, Satiti, Emmelia Nadira Wahyuningsih, Hapsari. (2017). *Pengembangan Potensi Desa Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ponggok Kabupaten Klaten*. Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta.

tersendiri yaitu dapat berenang di bawah permukaan air dengan melakukan kegiatan snorkel di air tawar yang berisi ikan-ikan air tawar seperti nilai, koi, bawal, patin, dan gurami. Banyaknya pengunjung yang mengabadikan momen ketika *snorkel* di bawah air bersama para ikan menyebabkan Umbul Ponggok ramai dikunjungi oleh wisatawan terutama anak muda.

Selain sebagai tempat berenang, Umbul Ponggok juga kerap dijadikan sebagai tempat latihan SAR (*Search and Rescue*) dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan juga biasa dipakai untuk berlatih menyelam para pecinta olahraga menyelam. Dengan kedalaman kolam sekitar 1,5 meter sampai 2,5 meter dan nuansa bawah laut yang terdapat pasir putih, batu-batu yang berukuran relatif besar dan banyak ikan air tawar yang berukuran kecil sampai besar, pelatihan menyelam di tempat ini menjadi menyenangkan.⁷ Berikut ini merupakan destinasi wisata yang ada di Desa Ponggok. Sebagaimana di tunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.5 Destinasi Wisata di Desa Ponggok Kabupaten Klaten

No	Nama Wisata	Keterangan
1	Umbul Ponggok	Snorkling, Diving, Foto Underwater
2	Umbul Sigedang	Area Konservasi Air, Spot Area Foto Yang Eksotis. Relief yang beragam (Datar dan Tinggi)
3	Ponggok Ciblon	Area Playground, Resto, Kolam Renang Dewasa & Anak, Outbond.
4	Umbul Ingas (Cokro tulung)	Pemandian, Flying Fox dan Juga Waterboom
5	Umbul Besuki.	Wisata Adventure
6	Pemancingan waduk galau Ponggok	Pemancingan ikan

Sumber: <https://wisataponggok.com/> (Data diolah oleh peneliti tahun 2019)

Selain dikembangkan untuk daerah wisata, sumber air yang melimpah di Desa Ponggok juga dimanfaatkan oleh warga Desa Ponggok untuk membudidayakan ikan, terutama ikan nila. Desa dengan luas lahan potensial sebesar 8.0 Ha dimanfaatkan oleh masyarakat setempat melalui pengembangan

⁷ *Ibid.*

berbagai sektor usaha seperti budidaya ikan nila. Budi daya ikan nila menggunakan lahan sebesar 5 Ha dengan menghasilkan produksi ikan koi sebanyak 0,57 Ton dalam sehari. Selain budidaya ikan masyarakat sekitar juga mengembangkan sektor budidaya udang galah, dalam per bulannya masyarakat setempat mampu menghasilkan udang galah sebanyak 1 kuintal. Selain budidaya ikan nila dan udang galah, masyarakat sekitar juga mulai mengembangkan budidaya ikan koi sebagai alternatif lain dalam memanfaatkan lahan yang ada sebagai alternatif tambahan bagi penghasilan masyarakat setempat.⁸

Adanya sumber mata air yang melimpah merupakan salah satu potensi yang di miliki Desa Ponggok, yang kedepannya diharapkan dapat dimaksimalkan dengan baik. Selain sumber mata air yang melimpah, hal yang perlu di perhatian lainnya adalah pasrtisipasi masyarakat yang aktif dalam sektor pariwisata dan sektor-sektor lainnya. Salah satu bentuk partisipasi aktif masyarakat adalah dengan memberikan dukungan dan berkontribusi dalam membantu pengembangan dan pembangunan pariwisata desanya, selain dukungan berupa partisipasi masyarakat setempat juga memberikan dukungan pada lembaga desa (institusi lokal) dalam menyukseskan program-program yang dilaksanakan oleh lembaga desa. Lembaga desa sendiri menjadi institusi lokal yang sangat mendukung akan perkembangan dan pembangunan sektor pariwisata di Desa Ponggok. Lembaga desa (institusi lokal) seperti Bumdes, Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), Pokdakan (Kelompok Pembudidaya Ikan), Unit Pengelola Spotengan (UPL), dan Unit Pengelola Sosial.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kedua landasan tersebut membuat peran Bumdes semakin kuat dalam membantu pengelolaan sektor pariwisata di Desa Ponggok. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) didirikan pada tahun 2009 dengan nama Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tirta Mandiri.

⁸ *Ibid.*

Selain sebagai pengelola potensi wisata di Desa Ponggok, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tirta Mandiri sendiri memiliki strategi dalam pengelolaan yang bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh Bumdes, Strategi tersebut meliputi:

- a. Sosialisasi dan pembelajaran tentang Bumdes.
- b. Pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang Bumdes.
- c. Pendirian Bumdes yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*Renting*).
- d. Analisis kelayakan usaha Bumdes yang berorientasi pada usaha Perantara (*Brokering*), Usaha Bersama (*Holding*), Bisnis Sosial (*Social Business*), Bisnis Keuangan (*Financial Business*) Dan Perdagangan (*Trading*), Bisnis Penyewaan (*Renting*) yang meliputi beberapa aspek seperti aspek manajemen, aspek teknologi dan aspek teknis, aspek sosial-budaya, aspek ekonomi, aspek keuangan, aspek politik, aspek lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek hukum dan aspek perencanaan usaha.
- e. Pengembangan kerja sama kemitraan strategis dalam bentuk kerja sama Bumdes antar Desa atau kerja sama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor.
- f. Diversifikasi usaha dalam bentuk Bumdes yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).⁹

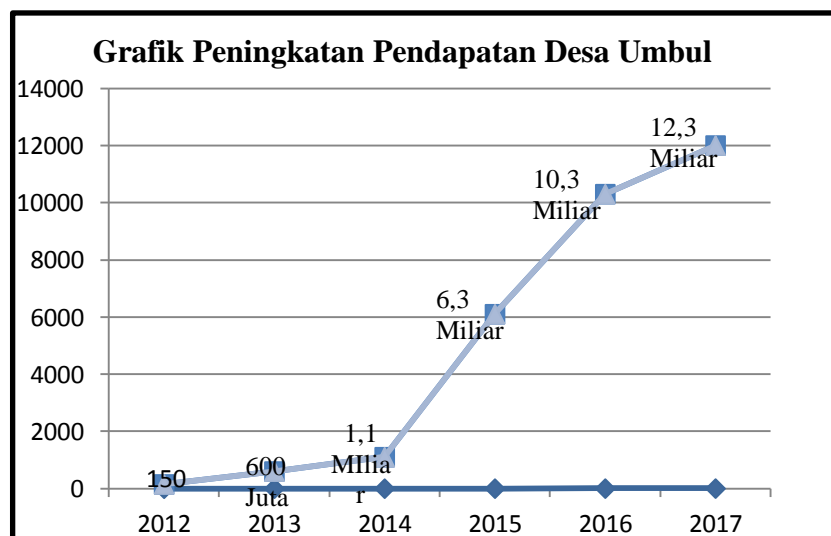
Melalui pengembangan objek Wisata Umbul Ponggok terbukti pada tahun 2012 Desa Ponggok memperoleh pendapatan kotor sebesar 150 Juta. Satu tahun kemudian pendapatan dari Wisata Umbul Ponggok meningkat menjadi 600 Juta. Pada tahun 2014 meningkat menjadi 1,1Miliar. Pada awalnya pemerintah desa hanya menargetkan 800Juta. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2015 Pemerintah Desa Ponggok menargetkan sebesar 3,8 Miliar akan tetapi pendapatan mencapai 6,1 Miliar hal tersebut tentu melebihi target yang telah ditentukan oleh Pemerintah

⁹Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (diakses melalui <http://psflibrary.org/>)

Desa Ponggok. Pada tahun 2016 pemerintah desa lagi-lagi memberikan target sebesar 9 Miliar akan tetapi terealisasi sebesar 10,3 Miliar sedangkan pada tahun 2017 pendapat desa mencapai 12 Miliar.

Menurut “Joko Winarno - Direktur dari Bumdes Tirta Mandiri - bahwa pada tahun 2018 target pendapatan dari Desa Ponggok ditargetkan pada angka 15 Miliar”. Selain pendapatan dari sektor wisata, adanya perkembangan tiga belas unit mitra usaha yang dikelola masyarakat, sembilan diantaranya sudah berbentuk PT (Perseroan Terbatas) merupakan salah satu sektor yang mendukung berkembangnya Bumdes Tirta Mandiri.¹⁰ Dari perkembangan sektor pariwisata dan unit mitra usaha membuat Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Ponggok meningkat dengan cepat. Berikut merupakan grafik peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Ponggok dari tahun 2012-2017.

Grafik 1.1 Peningkatan PAD Desa Umbul Ponggok dari tahun 2012-2017



Sumber: <https://www.ekonomidesa.com>

Pada grafik di atas menunjukkan adanya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) di sektor pariwisata yang awalnya hanya 150 Juta menjadi 12,3 Miliar pada tahun 2017. Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) diiringi dengan peningkatan jumlah wisatawan di Wisata Umbul Ponggok dimana setiap

¹⁰ <https://www.ekonomidesa.com> (diakses pada tanggal 16 Januari 2019, Pukul 14.33 WIB)

tahunnya peningkatan pengunjung begitu besar. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.6 Data Jumlah Pengunjung Objek Wisata Umbul Pongkok tahun 2015-2018

No	Tahun	Jumlah Pengunjung
1.	2015	331.551 Pengunjung
2.	2016	340.020 Pengunjung
3.	2017	355.078 Pengunjung
4.	2018	495.616 Pengunjung

Sumber: Laporan Tahunan Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri Desa Pongkok tahun 2016. Dokumen tidak dipublish

Pada tabel 1.6 menunjukkan bahwa jumlah pengunjung di objek Wisata Umbul Pongkok pada tahun 2015 sebanyak 331.551 Pengunjung, kemudian mengalami peningkatan yang begitu pesat pada tahun 2018 sebanyak 495.616 Pengunjung.

Peningkatan pengunjung setiap tahunnya yang begitu pesat tidak salah apabila pendapatan asli daerah Desa Pongkok pun semakin naik. Peran pemerintah desa yang mampu mengelola potensi desa dibantu dengan lembaga desa seperti Bumdes ini menjadikan Desa Pongkok salah satu Desa yang mendapat penghargaan di bidang pemberdayaan masyarakat akibat partisipasi dan ambil adilnya masyarakat beserta pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desa.¹¹ Selain Desa Pongkok terdapat sepuluh desa lainnya yang mendapat penghargaan. Sepuluh desa yang menerima penghargaan terdiri atas sepuluh kategori yaitu kategori penghargaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

¹¹ www.nasional.kompas.com diakses pada tanggal 16 Januari 2019, Pukul 14.50 WIB)

Tabel 1.7 Desa yang mendapat penghargaan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2017

No	Kategori Penghargaan	Nama Desa	Daerah Kabupaten
1.	Desa dengan Perkembangan Tercepat	Nagari (Desa Adat)	Kabupaten Pesisir Selatan
2.	Desa Adat	Desa Madobak	Kabupaten Kepulauan Mentawai
3.	Desa Wisata Jejaring Bisnis.	Desa Taansari	Kabupaten Banyuwangi
4.	Desa Pemberdayaan Masyarakat	Desa Ponggok	Kabupaten Klaten
5.	Desa Wisata Agro	Desa Pujon Kidul	Kabupaten Malang
6.	Desa Wisata Iptek	Desa Seigentung	Kabupaten Gunung Kidul
7.	Desa Wisata Budaya	Desa Ubud	Kabupaten Gianyar
8.	Desa Wisata Alam	Desa Waturaka	Kabupaten Ende
9.	Desa Wisata Kreatif	Desa Teluk Meranti	Kabupaten Pelalawan
10.	Desa Wisata Maritim	Desa Bontagula	Kabupaten Bontang

Sumber: www.nasional.kompas.com (diolah oleh Peneliti tahun 2019)

Pemberian anugerah ini dilaksanakan untuk menunjukkan bahwa desa mampu berkembang dan berprestasi serta mendukung visi pemerintah untuk memajukan daerah melalui pariwisata karena sektor tersebut dinilai cepat dan mudah dikembangkan. Serta sebagai wujud bahwa beberapa desa telah mengalami perkembangan berkat adanya BUMDes. Terlebih lagi dengan adanya anggaran dana desa yang diterima dari pemerintah pusat setiap tahunnya diharapkan dapat digunakan untuk menjalankan setiap program melalui pemanfaatan dana desa serta menjadi faktor pendorong untuk pengembangan BUMDes. Dengan pemberian penghargaan Desa Wisata terbaik, diharapkan mampu menjadi motivasi bagi desa lainnya untuk dapat menunjukkan bahwa suatu desa yang jauh dari perkotaan mampu berprestasi sehingga pemerataan pembangunan di Indonesia sendiri dapat terwujud dengan adil.

Bentuk pengembangan Wisata Umbul Ponggok yang pernah dilakukan oleh bumdes dan pemerintah desa ponggok meliputi:¹²

¹² Surya Sumadi, *Strategi Pengembangan Objek Wisata Umbul Ponggok Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tirta Mandiri Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.*

1. Penataan lahan parkir.
2. Penataan kios pedagang di dalam lahan Umbul Ponggok agar lebih tertib.
3. Pembuatan website Umbul Ponggok sebagai tempat untuk mempromosikan wisata Umbul Ponggok.
4. Penambahan petugas keamanan untuk hari sabtu / minggu ataupun kegiatan besar lain, dan
5. Peningkatan pelayanan satu pintu, salah satunya dengan penyewaan alat-alat renang dalam satu loket agar lebih memudahkan pengunjung dalam menyewa peralatan yang akan digunakan.

Keberhasilan pembangunan dan pengembangan wisata Umbul Ponggok di Kabupaten Klaten tentu saja tidak hanya berasal dari satu peran *stakeholders* semata. Namun, dalam pengembangan wisata umbul ponggok melakukan peningkatan kerjasama dengan instansi-instansi terkait, *stakeholders*, dan masyarakat setempat. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana kolaborasi antar *stakeholders* dalam pengembangan Wisata Umbul Ponggok.

Sebelumnya peneliti telah melakukan penelusuran pada penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengembangan sektor pariwisata. Terdapat beberapa *study* terdahulu yang membahas mengenai pengembangan pariwisata. Berikut merupakan tabel penelitian terdahulu yang pernah dilakukan pada pengembangan pariwisata.

Tabel 1.8 Penelitian Terdahulu pada pengembangan pariwisata

No	Peneliti	Nama jurnal	Hasil penelitian
1	Helln Angga Devy dan R.B. Soemanto	Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata Alam Sebagai Daerah Tujuan Wisata Di Kabupaten Karanganyar (Studi Kasus Obyek Wisata Air Terjun Jumog Di Kawasan Wisata Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar).	Hasil penelitian ini memberikan banyak informasi kepada peneliti mengenai strategi-strategi dalam pengembangan wisata di Karanganyar. Strategi-strategi yang dilakukan yaitu: Membuat kebijakan-kebijakan telah didukung oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah serta para pelaku wisata di kawasan tersebut, Pelaku wisata diantaranya pedagang, pengelola lahan parkir dan karyawan Objek Wisata Air Terjun Jumog hanya boleh masyarakat yang berasal dari Desa Berjo, Promosi kawasan Objek Wisata Air Terjun Jumog, Kemudian Pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa “Berjo” dimulai secara fisik yakni dengan menambahkan dan memperbaiki beberapa fasilitas dan prasarana. Sedangkan pengembangan non-fisik yang dilakukan adalah dengan membentuk beberapa unit diantaranya adalah unit loket, prasarana, kebersihan, musik, keamanan dan warung makan. ¹³ Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah pada lokus serta pada teori yang digunakan dalam menganalisis pengembangan kawasan pariwisata.
2	Deddy Prasetya dan Maha Rani	Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Studi Kasus:	Penelitian berikutnya dilakukan oleh dengan judul. Hasil dari penelitian ini adalah dari adanya pengembangan potensi wisata yang

¹³Helln Angga Devy Dan R.B. Soemanto. (2017). *Pengembangan Objek Dan Daya Tarik Wisata Alam Sebagai Daerah Tujuan Wisata Di Kabupaten Karanganyar (Studi Kasus Objek Wisata Air Terjun Jumog Di Kawasan Wisata Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar)*. Vol. 32, No. 1 Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

		Wisata Pantai Lombang)	ada di Kabupaten Sumenep dampak yang diberikan kepada masyarakat sekitar belum begitu dirasakan oleh masyarakat setempat sebab sistem pengalokasian pendapatan dari wisatawan yang diterima oleh masyarakat masih sedikit hal tersebut disebabkan karena letak geografis dari kabupaten Sumenep yang berada di ujung pulau Madura, sehingga dana yang masuk untuk pemerintah daerah juga tidak seimbang dengan pengembangannya maka butuh waktu bila ingin adanya peningkatan. Selain letak geografis terdapat beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam pengembangan potensi wisata ini yaitu segi infrastruktur yang dimana hal tersebut masih belum mendukung dalam pengembangan pariwisata di Sumenep sebab kurangnya pemerintah untuk penyediaan infrastruktur, dapat dilihat bahwa fasilitas pendukung pariwisata masih terbatas misalnya jalan-jalan menuju tempat wisata yang akan dikunjungi masih banyak kerusakan cukup parah sehingga ini membuat para wisatawan kurang nyaman dengan infrastruktur yang ada oleh sebab itu memberikan efek jumlah kedatangan wisatawan serta masih kurangnya penerangan di sepanjang jalan yang dilalui hal tersebut juga mengurangi para wisatawan untuk berkunjung. ¹⁴
3	Khusnul Khotimah, Wilopo Dan Luchman Hakim	Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Budaya (Studi Kasus Pada Kawasan Situs Trowulan Sebagai	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Potensi yang dapat dikembangkan menjadi Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) di kawasan situs Trowulan berupa daya tarik

¹⁴Deddy Prasetya dan Maha Rani. (2014). *Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Studi Kasus: Pantai Lombang)*. Jurnal Politik Muda. Vol. 3 No.3.

		Pariwisata Budaya Unggulan Di Kabupaten Mojokerto.	wisata sejarah dan budaya, wisata minat khusus, wisata buatan yang berbasis budaya dan wisata berbasis lingkungan (ekowisata) yang didukung dengan keberagaman <i>event</i> budaya dan cinderemata khas dari Trowulan. Ketersediaan aspek aksesibilitas, amenitas dan <i>ancillary service</i> sudah cukup memadai namun masih perlu perbaikan dalam penyediaan transportasi khusus Trowulan, penyediaan <i>homestay</i> , pos informasi pariwisata, <i>money changer</i> , gedung pertunjukan, fasilitas ATM, pos kesehatan dan pos keamanan. Kesiapan dan peran kelembagaan dalam kegiatan pariwisata perlu diperbaiki lagi terutama dalam hal kerjasama antara lembaga dari unsur pemerintah, swasta dan masyarakat. Terdapat faktor pendorong meliputi nama besar Majapahit dan dukungan pemerintah. Sedangkan faktor penghambat berupa kurangnya dana, kurangnya promosi, minimnya sarana prasarana, minimnya SDM profesional di bidang pariwisata dan munculnya isu-isu negatif terkait dengan pengembangan kawasan situs Trowulan. ¹⁵
4	Mclachlan Sam and Tony Binns	<i>Tourism, Development And Corporate Social Responsibility In Livingstone, Zambia.</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan wisata berkelanjutan membutuhkan promosi dan kerjasama antara masyarakat setempat dengan pemerintah dan organisasi-organisasi lokal pariwisata di Livingstone guna mendorong semua bisnis yang melibatkan CSR dan

¹⁵Khusnul Khotimah, Wilopo Dan Luchman Hakim. (2017). *Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Budaya (Studi Kasus Pada Kawasan Situs Trowulan Sebagai Pariwisata Budaya Unggulan Di Kabupaten Mojokerto)*. Fakultas Ilmu Administrasi. Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)|Vol. 41 No.1 Januari 2017. Universitas Brawijaya.

			<p>masyarakat. Kemudian adanya berbagai proyek yang bekerjasama dengan CSR baik besar maupun kecil, umumnya memiliki dampak yang sangat positif pada masyarakat setempat. Di Livingstone, terbukti bahwa, sementara ini ada sejumlah kecil bisnis yang terlibat dalam praktik CSR, hasil dari inisiatif tersebut sangat positif. Diharapkan bahwa pada saatnya nanti lebih banyak bisnis yang akan terlibat, untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata berkelanjutan dan memiliki hasil positif, baik dalam hal pengalaman wisata maupun perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat setempat.</p>
5	Butler Gareth And Rogerson Christian M	<i>Inclusive Local Tourism Development In South Africa: Evidence From Dullstroom.</i>	<p>Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam mencapai tujuan pengembangan pariwisata inklusif ada peran penting pemerintah sektor swasta dan masyarakat local. Di Afrika Selatan tingkat pengangguran masih begitu tinggi tidak terkecuali di daerah Dullstroom daerah non metropolitan atau pedesaan.</p> <p>Di daerah ini mereka sebagian besar masyarakatnya sangat menggantungkan ekonominya melalui sektor pariwisata. Melalui sektor pariwisata masyarakat yang memilki <i>lowskilled</i> sudah menjadi karyawan tetap walaupun dengan gaji yang rendah. Selain itu , penelitian ini juga menyoroti potensi pertumbuhan yang diberikan beberapa penduduk lokal di tempat kerja mereka melalui lapangan kerja pariwisata. Terbukti bahwa pariwisata dianggap sebagai wahana pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat yang terpinggirkan di Dullstroom, khususnya perempuan</p>

			<p>kulit hitam. Mayoritas karyawan pariwisata di Dullstroom adalah perempuan kulit hitam, wanita-wanita ini telah di berdayakan melalui distribusi keterampilan dan kualifikasi baru yang memungkinkan mereka untuk merasa diberdayakan secara ekonomi, sosial dan psikologis. Sebagian besar berpendapat bahwa mereka sekarang menjadi mandiri dan tidak lagi bergantung pada pemberian keluarga atau uang yang diberikan kepada mereka oleh suami mereka. Selain itu, mata pencaharian ini termasuk memperkuat ikatan masyarakat dan memberdayakan mereka dengan keterampilan dan tingkat kepercayaan untuk berkembang dan tumbuh di luar lingkup pengaruh laki-laki tradisional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus Dullstroom lintasan inklusif pengembangan pariwisata telah memberi manfaat dan meningkatkan kehidupan.</p>
6	<p>Suzanne Wilson, Daniel R. Fesenmaier, Julie Fesenmaier and John C. Van Es</p>	<p><i>Factors for Success in Rural Tourism Development</i></p>	<p>Faktor-faktor yang mempengaruhi dan dukungan untuk pengembangan pariwisata mengungkapkan efek langsung yang lebih tinggi untuk sebagian besar faktor yang mempengaruhi jika dibandingkan dengan efek tidak langsung mereka. ini menunjukkan bahwa otoritas lokal harus lebih memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi untuk meningkatkan dukungan untuk pengembangan pariwisata, dan bahwa persepsi penduduk terhadap pengembangan pariwisata tidak penting dalam membentuk hubungan ini secara terpisah. Alih-alih, meningkatkan kualitas atribut tujuan yang terkait erat dengan</p>

			<p>faktor-faktor yang memengaruhi yang telah diteliti selama penelitian ini harus mengarah pada peningkatan dukungan penduduk untuk pengembangan pariwisata sebagai hasil akhir. Oleh karena itu, otoritas lokal dan manajer pariwisata harus lebih memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi saat merancang strategi pengembangan pariwisata. Meningkatkan keterlibatan penduduk dalam proses pengembangan pariwisata dan pelestarian warisan dapat meningkatkan dukungan mereka untuk pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, otoritas lokal Kashan dan Tabriz harus mempertimbangkan kembali kebijakan dan proses yang masih ada terkait pelibatan masyarakat untuk memfasilitasi dan meningkatkan keterlibatan, keterikatan, dan partisipasi penduduk yang meningkat. Pendekatan ini dapat memengaruhi persepsi penduduk tentang dampak pariwisata dari waktu ke waktu, tetapi dukungan mereka untuk pengembangan lebih lanjut harus dipantau secara teratur untuk memastikan bahwa inisiatif pengembangan pariwisata terus memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.</p>
7	<p>Martin Gannon, S. Mostafa Rasoolimanesh, and Babak Taheri</p>	<p><i>Assessing the Mediating Role of Residents' Perceptions toward Tourism Development</i></p>	<p>Tingkat keterlibatan dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata, di samping pengelolaan dan konservasi warisan, juga dianggap rendah di Iran, yang dapat berfungsi sebagai penjelasan yang mungkin untuk efek keterlibatan yang tidak signifikan pada persepsi penduduk terhadap pengembangan pariwisata. Temuan menunjukkan</p>

		<p>bahwa penduduk kota-kota bersejarah ini tidak percaya bahwa pariwisata dapat berdampak menunjukkan efek sikap budaya yang tidak signifikan terhadap persepsi penduduk terhadap pengembangan pariwisata. Fokus pada pelestarian dan konservasi ini konsisten, dengan efek tertinggi pada persepsi penduduk tentang dampak pariwisata yang berasal dari sikap lingkungan, yang mengacu pada perlindungan alam, warisan, dan lingkungan masyarakat, diikuti oleh keuntungan ekonomi dan keterikatan masyarakat. Meskipun demikian, dengan meningkatkan kesadaran penduduk tentang manfaat ekonomi dari peningkatan pariwisata, pihak berwenang setempat mungkin dapat menarik dukungan yang lebih besar dan dengan demikian dapat melanjutkan proses pengembangan pariwisata berkelanjutan di Tabriz dan Kashan.</p>
--	--	--

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan Maka rumusan masalah penelitian ini yaitu “*Bagaimana Kolaborasi Antar Stakeholders dalam Pengembangan Wisata Umbul Ponggok Kabupaten Klaten*”?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Kolaborasi Antar *Stakeholders* dalam Pengembangan Wisata Umbul Ponggok Kabupaten Klaten dengan menggunakan konsep pengembangan pariwisata menurut Clare A Gunn. Selain untuk memberikan deskripsi mengenai bagaimana pengembangan pariwisata, penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan proses kolaborasi antar *stakeholder* dengan 5 aspek proses kolaborasi menurut Chris Ansell dan Alison Gash.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun secara praktis.

1.4.1 Manfaat Akademis

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan terdahulu yang sudah mengenai pengembangan wisata, maka ditemukan adanya gap antara *state of the art* antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Helln Angga Devy dan R.B. Soemanto yang berfokus pada Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata Alam dalam perspektif implementasi kebijakan dengan locus di Kabupaten Karanganyar. Sedangkan penelitian kedua dilakukan oleh oleh Deddy Prasetya dan Maha Rani yang berfokus pada Pengembangan Potensi Pariwisata dengan perspektif ekonomi kreatif di Kabupaten Sumenep. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Khusnul Khotimah, Wilopo dan Luchman Hakim dengan fokus Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Budaya dengan perspektif pengembangan kawasan di Kabupaten Mojokerto. Penelitian keempat yang dilakukan oleh Mclachlan Sam and Tony Binns M dengan fokus penelitian peran CSR dalam pengembangan pariwisata yang menggunakan konsep csr pada pengembangannya, locus pada penelitian ini berada di kota living stone, zambia. Kemudian penelitian berikutnya dilakukan oleh Butler Gareth And Rogerson Christian, penelitian ini yang berfokus pada pengembangan pariwisata dilihat dari presepektif pembangunan secara inklusif dengan lokus di daerah Dullstroom di Afrika Selatan. Penelitian berikutnya adalah penelitian yang di lakukan Suzanne Wilson, Daniel R. Fesenmaier, Julie Fesenmaier and John C. Van Es dengan menggunakan konsep faktor pendukung pengembangan wisata untuk melihat faktor mana yang paling mempengaruhi pengembangan pariwisata. Penelitian terakhir penelitian yang dilakukan oleh Martin Gannon, S. Mostafa Rasoolimanesh , and Babak Taheri penelitian ini berfokus strategi pengembangan pariwisata.

Dalam penelitian ini peneliti, ingin menjelaskan secara rinci mengenai bagaimana kolaborasi antar *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata dengan menggunakan konsep pengembangan wisata sehingga mengisi kekosongan yang ada dengan penelitian sebelumnya dan diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori dalam kajian Ilmu Administrasi Negara mengenai kebijakan manajemen publik dan kebijakan manajemen perkotaan. Serta diharapkan dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis dalam membuat karya ilmiah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terlibat pada kolaborasi *stakeholders* dalam pengembangan Wisata Umbul Pongok di Kabupaten Klaten agar ke depannya lebih baik lagi. Kemudian dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi daerah lain dalam pengembangan wisata.

1.5 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian kualitatif, untuk mempermudah memahami permasalahan mengenai kolaborasi antar stakeholder dalam pengembangan potensi Wisata Umbul Pongok. Peneliti menggunakan kerangka konseptual dengan tujuan untuk mengeksplorasi rumusan masalah. Penggunaan kerangka konseptual ini dapat dijadikan sebagai model konseptual, tinjauan pustaka, atau sebagai suatu konsep yang membantu menjelaskan apa yang berusaha ditemukan oleh seorang peneliti.

1.5.1 Konsep Pengembangan Pariwisata

1.5.1.1 Pengembangan

Pengembangan berasal dari kata dasar kembang yang artinya “bertambah sempurna” kemudian kata kembang tersebut mendapat imbuhan pe- dan an pada awal dan akhir kata tersebut. Apabila digabungkan maka menjadi kata pengembangan yang memiliki arti suatu proses ,perbuatan atau cara dalam usaha

untuk mencapai tujuan yang akan diinginkan agar tujuan tersebut menjadi lebih sempurna dari tujuan sebelumnya.¹⁶

Hal senada juga diungkapkan oleh Seels & Richey (dalam kutipan Alim Sumarno) mengatakan bahwa pengembangan berarti suatu proses menjelaskan atau mendeskripsikan secara spesifik rancangan dalam bentuk fisik kedalam bentuk fitur fisik.¹⁷

Pendapat dari Seel dan Richey juga didukung oleh pendapat dari Swarbrooke yang mengatakan bahwa, pengembangan merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya yang mengintegrasikan segala bentuk aspek yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dari suatu pengembangan itu sendiri.¹⁸

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Alkadri, menurutnya pengembangan adalah suatu kemampuan yang ditentukan oleh apa yang dapat dilakukan dengan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Pengembangan identik dengan keinginan menuju perbaikan kondisi disertai kemampuan untuk mewujudkannya.¹⁹

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa pengembangan adalah suatu proses perbuatan atau cara dalam upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya dengan keinginan untuk memperbaiki kondisi secara spesifik untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pengembangan pariwisata merupakan bagian dari proses pembangunan oleh sebab itu sebuah pengembangan tidak dapat dianggap sebagai hal yang biasa karena dalam pengembangan merupakan bagian kecil dari proses pembangunan.

¹⁶ <https://kbbi.web.id/perkembangan> (diakses pada tanggal 5 Mei 2019 ,Pukul 20.47 WIB)

¹⁷ https://www.academia.edu/4832768/Definisi_Pengembangan (diakses pada tanggal 1 April 2019, Pukul 17.28 WIB)

¹⁸ <http://pariwisataindonesia2015.blogspot.com/2015/11/konsep-pengembangan-pariwisata.html> (diakses pada tanggal 17 Mei 2019, pukul 14.12 WIB)

¹⁹ Kakambong Alamanda Debbyna. (2016). *Studi Deskriptif Tentang Multiplier Effect Pengembangan Kawasan Industri Ngoro Pada Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto*. Kebijakan Dan Manajemen. Vol.4.No.1.

Menurut pendapat Siagian, pembangunan adalah sesuatu yang direncanakan dan dilakukan secara sadar oleh suatu kelompok untuk mencapai pertumbuhan pada masyarakat atau suatu kelompok masyarakat untuk menuju modernitas dalam rangka pembangunan suatu bangsa.

1.5.1.2 Pariwisata

Pariwisata memiliki definisi yang berbeda-beda karena konsepnya yang sangat multidimensional. Berdasarkan perspektifnya masing-masing yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, beberapa ahli mendefinisikan pariwisata sebagai berikut :

Menurut pendapat Oka A.Yoeti mengatakan bahwa pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam di luar mencari nafkah.²⁰

Hal senada juga di katakan oleh Koen Meyers dan *World Tourism Organization* (WTO) yang mendefinisikan pariwisata adalah suatu aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh orang ke suatu tempat dan tinggal di suatu tempat yang jauh dari tempat tinggal lingkungan mereka sehari-hari dengan kurun waktu tidak lebih dari satu tahun dengan alasan bukan untuk menetap atau pun mencari nafkah, melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang, atau pun liburan.²¹

Sedangkan menurut pendapat Salah Wahab, beliau mengatakan bahwa pariwisata merupakan salah satu jenis industri baru yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat dalam hal penyediaan kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup serta menstimulasi sektor-sektor lain di daerah yang menerima wisatawan. Ia juga memandang bahwa pariwisata sebagai suatu sektor

²⁰ A, Yoeti, Oka. (1996), *Pengantar Ilmu Pariwisata, Edisi Revisi* Penerbit Angkasa, Bandung.

²¹ Kusumaningrum, Dian. (2009). *Persepsi Wisatawan Nusantara Terhadap Daya Tarik Wisata di Kota Palembang*. Tesis PS. Magister Kajian Pariwisata. Universitas Gadjah Mada.

yang kompleks karena meliputi industri-industri lainnya. Seperti industri kerajinan dan cinderamata, penginapan, transportasi dan lain-lain.

Hal yang berbeda disampaikan oleh asosiasi pariwisata atau *The Ecotourism Society* berpendapat bahwa Pariwisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan, melestarikan kehidupan dan dapat menyejahterakan penduduk setempat.²²

Berdasarkan pendapat para ahli di atas peneliti menyimpulkan bahwa pariwisata adalah serangkaian aktivitas perjalanan ke suatu tempat yang ingin dituju untuk sementara waktu dengan alasan tidak ingin menetap melainkan hanya ingin menghabiskan waktu luang serta melakukan kegiatan yang berhubungan dengan alam.

Menurut pendapat Spillane, pariwisata dikategorikan dalam beberapa jenis dengan tujuan untuk:²³

1. Menikmati Perjalanan (*Pleasure Tourism*).
2. Rekreasi (*Recreation Tourism*).
3. Kebudayaan (*Cultural Tourism*).
4. Olahraga (*Sports Tourism*).
5. Urusan Usaha Dagang (*Business Tourism*).
6. Berkonvensi (*Convention Tourism*).

Adanya pengembangan pariwisata bukan hanya memiliki tujuan yang ingin dicapai tetapi dalam sektor pariwisata terdapat beberapa kategori pariwisata. Menurut Spillane Masing-masing jenis pariwisata tersebut adalah :

1. Pariwisata untuk Menikmati Perjalanan (*Pleasure Tourism*).

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk menuju ketempat wisata, untuk mencari udara yang segar, mencari suasana yang baru, yang berbeda dengan suasana ditempat

²² <http://evinspireconsulting.com/konsep-pengembangan-pariwisata/> (diakses pada tanggal 2 April 2019, Pukul 12.36 WIB)

²³ James J, Spillane. (1990). *Ekonomi Pariwisata*. Kanisius. Yogyakarta. Hlm: 28

tinggalnya, yang bertujuan untuk mendapatkan suasana baru bahkan untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian di daerah luar kota.

2. Pariwisata untuk Rekreasi (*Recreation Tourism*).

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang menghendaki pemanfaatan hari-hari liburnya untuk beristirahat, untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohaninya, yang ingin menyegarkan keletihan dan kelelahannya.

3. Pariwisata untuk Kebudayaan (*Cultural Tourism*).

Jenis pariwisata ini dilakukan karena adanya keinginan untuk mempelajari adat istiadat, kelembagaan, dan cara hidup rakyat daerah lain, Selain itu untuk mengunjungi monumen bersejarah, peninggalan peradaban masa lalu, pusat-pusat kesenian, pusat-pusat keagamaan, atau untuk ikut serta dalam festival-festival seni musik, teater, tarian rakyat, dan lain-lain. Pariwisata untuk Olahraga (*Sports Tourism*). Jenis ini dapat dibagi dalam dua kategori :

a. *Big Sports Event*, pariwisata yang dilakukan karena adanya peristiwa-peristiwa olahraga besar seperti Olympiade Games, World Cup, dan

b. *Sporting Tourism of the Practitioner*, yaitu pariwisata olahraga yang sering dilakukan oleh mereka yang ingin berlatih dan mengembangkan kemampuan pada dirinya, seperti mendaki gunung, naik kuda, diving dan lain-lain.

4. Pariwisata untuk Urusan Usaha Dagang (*Business Tourism*)

Perjalanan usaha adalah jenis pariwisata perjalanan yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan yang tujuannya tidak dapat dipilih oleh pelaku wisata serta waktu perjalanan yang sudah ditentukan.

5. Pariwisata untuk Berkonvensi (*Convention Tourism*).

Pariwisata konvensi adalah pariwisata yang dihadiri oleh ratusan bahkan ratusan bahkan konvensi sering dihadiri oleh ratusan dan bahkan ribuan peserta yang biasanya tinggal beberapa hari di kota atau negara penyelenggara.

Hal yang berbeda dikatakan oleh Holden, menurutnya jenis pariwisata dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:²⁴

1. Pariwisata *Adventure*

Pariwisata *adventure* merupakan suatu kegiatan pariwisata yang bernuansa petualangan (*adventure*). Petualangan tersebut dibagi menjadi tiga skala yaitu skala kecil dapat terdiri dari *bird watching*, *scuba diving*, dalam skala menengah terdiri dari kegiatan yang bernuansa olahraga, seperti *canoeing* dan *rafting* sedangkan dalam skala besar kegiatan petualangan seperti taman safari

2. Pariwisata Alam

Pariwisata alam adalah kegiatan pariwisata yang memfokuskan diri pada studi dan observasi yang berkaitan dengan flora (tumbuhan) dan fauna (binatang).

3. Pariwisata Kerakyatan

Pariwisata kerakyatan atau *Community Tourism* merupakan suatu kegiatan pariwisata yang dijalankan oleh rakyat, baik dari segi perencanaan sampai evaluasi dan segala manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut sepenuhnya untuk rakyat yang bersangkutan.

Dalam konteks penelitian ini maka jenis pariwisata yang akan menjadi objek peneliti merupakan pariwisata *adventure*. Pariwisata *adventure* yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan suatu kegiatan pariwisata yang bernuansa petualangan (*Adventure*). Petualangan tersebut dibagi menjadi tiga skala yaitu skala kecil dapat terdiri dari *bird watching*, *scuba diving*, dalam skala menengah terdiri dari kegiatan yang bernuansa olahraga. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pengembangan pariwisata dengan locus pada pariwisata Umbul Pongok di Kabupaten Klaten.

1.5.1.3 Pengembangan Pariwisata

Melihat definisi pengembangan dan pariwisata yang dikemukakan oleh beberapa ahli, peneliti menyimpulkan bahwa pengembangan pariwisata

²⁴Sukidin dan Pudjo Suharso. (2015). *Model Analytical Network Process (Anp) Dalam Pengembangan Pariwisata Di Jember*. Prosiding Seminar Nasional.

merupakan suatu proses, perbuatan atau cara dalam upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam yang dapat dinikmati oleh individu untuk sementara waktu atau beberapa waktu yang tidak dapat ditentukan. Menurut Clare A. Gunn mengemukakan bahwa keberhasilan dalam pengembangan pariwisata di suatu daerah sangat tergantung kepada kemampuan perencana dalam mengintegrasikan kedua sisi tersebut secara berimbang ke dalam sebuah rencana pengembangan pariwisata.²⁵

Di Indonesia pengembangan pariwisata telah diatur oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI dalam rencana strategi dengan tujuan untuk:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan serta pemerataan pembangunan di bidang pariwisata.
2. Mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkesinambungan sehingga memberikan manfaat sosial-budaya, sosial ekonomi bagi masyarakat dan daerah, serta terpeliharanya mutu lingkungan hidup.
3. Meningkatkan kepuasan wisatawan dan memperluas pangsa pasar.
4. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan pariwisata Indonesia sebagai berdayaguna, produktif, transparan dan bebas KKN untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dalam institusi yang merupakan amanah yang dipertanggungjawabkan (Accountable).²⁶

Menurut Triwahyudi dalam pengembangan pariwisata di suatu daerah atau wilayah secara tidak langsung memiliki tujuan serta manfaat bagi masyarakat sekitar. Adapun manfaat utama dari pengembangan pariwisata yaitu:²⁷

1. Pariwisata dapat menciptakan diversifikasi produk, menjadikan ekonomi lokal tidak hanya tergantung pada sektor utama.

²⁵ <http://cvinspireconsulting.com/konsep-pengembangan-pariwisata/> (diakses pada tanggal 22 Juli 2019, pukul 22.35 WIB)

²⁶ <http://www.kemenpar.go.id/> (diakses pada tanggal 25 Mei 2019 pukul 13.02 WIB)

²⁷ Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten. (2002). Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Klaten.

2. Sektor pariwisata adalah sektor yang padat karya, sehingga dapat memudahkan kesempatan kerja yang besar untuk generasi muda.
3. Pariwisata menciptakan peluang bagi produk baru, fasilitas pelayanan dan pengembangan bisnis yang sudah ada.
4. Pariwisata dapat mempercepat pengembangan permukiman.
5. Pariwisata dapat meningkatkan pelayanan transportasi di suatu wilayah.
6. Pariwisata dapat meningkatkan peluang mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi untuk masyarakat.
7. Pariwisata menggaris bawahi kebutuhan pengaturan yang sesuai dengan kebijakan dan rencana yang efektif, untuk menjamin kelestarian lingkungan agar tetap aman.
8. Pariwisata dapat meningkatkan interaksi sosial antara masyarakat dengan wisatawan domestik yang akan meningkatkan wawasan masyarakat lokal.
9. Pariwisata dapat meningkatkan infrastruktur.²⁸

Sedangkan tujuan dari pengembangan pariwisata menurut UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pariwisata dijelaskan bahwa tujuan dari pengembangan sektor pariwisata adalah:²⁹

1. Meningkatkan pendapatan devisa khususnya pendapatan bagi negara
2. Meningkatkan pertumbuhan di ekonomi masyarakat
3. Memperkenalkan dan memberdayakan keindahan alam dan kebudayaan indonesia.
4. Meningkatkan persaudaraan atau persahabatan nasional bahkan internasional.

Menurut Cooper yang dikutip oleh Sunaryo menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata mengandung makna sebagai upaya untuk meningkatkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu objek wisata. Peningkatan sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah atau negara tersebut harus diimbangi dengan

²⁸ <https://www.academia.edu> (diakses pada tanggal 31 maret 2019 pukul 21.05 WIB)

²⁹ A.Yoeti.Oka. (2008). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Penerbit PT.Pradnya Paramita. Jakarta. Hlm:79-80.

komponen-komponen yang mendukung dalam pengembangan ojek wisata. Komponen-komponen yang dimaksud adalah:³⁰

- a. Objek daya tarik wisata (*Attraction*) yang mencakup keunikan dan daya tarik berbasis alam, budaya, maupun buatan/artificial.
- b. Aksesibilitas (*Accessibility*) yang mencakup kemudahan sarana dan sistem transportasi.
- c. Amenitas (*Amenities*) yang mencakup fasilitas penunjang dan pendukung wisata.
- d. Fasilitas umum (*Ancillary Service*) yang mendukung kegiatan pariwisata.
- e. Kelembagaan (*Institutions*) yang memiliki kewenangan, tanggung jawab dan peran dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata.

Menurut Sondang Siagaan dalam pengembangan terdapat dua bentuk pembangunan yang menunjang pengembangan pariwisata yaitu:³¹

1. Pembangunan Fisik

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan fisik ataupun lembaga yang mempunyai kegiatan lain di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. Pembangunan fisik dilakukan agar masyarakat dapat menggunakan sarana infrastruktur yang ada untuk menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Pembangunan fisik diartikan sebagai alat atau fasilitas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat seperti pembangunan:³²

- a. Prasarana perhubungan: jalan, jembatan, dan lain-lain.
- b. Prasarana pemasaran: gedung, pasar
- c. Prasarana sosial, gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, dan puskesmas
- d. Prasarana produksi saluran air.

³⁰Khusnul Khotimah, Wilopo, Luchman Hakim. (2017). *Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Budaya (Studi Kasus Pada Kawasan Situs Trowulan Sebagai Pariwisata Budaya Unggulan Di Kabupaten Mojokerto)*. Jurnal Administrasi Bisnis (Jab). Vol. 41 No.1.

³¹ Islamiyah Wahyuni. 2018. *Studi Eksploratif tentang Faktor-Faktor Pendukung Pengembangan Kawasan Wisata Religi Makam KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Kabupaten Jombang*. Kebijakan dan Manajemen Publik. Volume 6 nomor 3.

³² *Ibid.*

Pembangunan fisik dalam penelitian ini merujuk pada siapa yang terlibat dalam pembangunan sarana dan prasarana, bentuk pembangunan sarana dan prasarana, dan dampak yang diberikan terhadap pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan.

2. Pembangunan Non Fisik

Pembangunan non fisik merupakan pembangunan yang berkaitan dengan adanya pembangunan dalam beberapa aspek seperti aspek pembangunan manusia, ekonomi, kesehatan dan pendidikan.³³ Salah satu aspek yang berkaitan langsung dengan adanya pengembangan pariwisata dalam pembangunan non fisik adalah terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat akibat ada pengembangan pariwisata disekitar wisata. Disisi lain dari pengembangan pariwisata memiliki dampak terhadap peningkatkan taraf dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pembangunan non fisik pada penelitian ini merujuk pada terciptanya lapangan pekerjaan dan peningkatan wirausaha dalam masyarakat.

Selain adanya komponen-komponen dalam pengembangan pariwisata terdapat faktor yang mendukung pengembangan pariwisata. Menurut Clare A. Gunn. dalam bukunya yang berjudul *Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases* terdapat Faktor-faktor pendukung yang memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana pariwisata dikembangkan. Seperti yang diungkapkan pada pernyataan berikut:

*“Such a core of functioning components are greatly core of tourism system because all sectors may be influenced by many external factors. Planning cannot be concerned solely with the as subject to outside influences as those under their own control. Several factors can have great influence on how tourism is developed. A brief examination of these may help in understanding this complicated reality of tourism, critical to planning, and the proper functioning of the tourism system.”*³⁴

³³ *Ibid.*

³⁴ Clare A. Gunn. (2002). *Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases*. New Yor. Routledge, Hlm: 59

Faktor pendukung yang dimaksud oleh Clare A.Gunn adalah Sumber daya alam, Warisan budaya, Biaya atau keuangan, Tenaga kerja/Pekerja, Pihak Swasta, Masyarakat, Kebijakan Pemerintah, Organisasi.³⁵

1. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam sangat penting dalam pengembangan pariwisata. Sumber daya alam dalam pariwisata meliputi iklim, kehidupan air, vegetatif, margasatwa, kondisi topografi, dan permukaan geologi.

Sumber daya alam dalam penelitian ini merujuk pada kondisi alam yang ada di sekitar wisata.

2. Warisan Budaya

Dalam beberapa tahun terakhir, segmen pasar dalam pariwisata telah banyak berubah yang awalnya hanya mencari destinasi dan membangun pariwisata saat ini berubah menjadi mengelolah potensi warisan budaya yang ada disuatu daerah. Kategori warisan budaya ini mencakup situs prasejarah, tempat bersejarah, tempat etnis, pengetahuan, pendidikan, industri, pusat perdagangan, tempat pertunjukan seni, museum, galery, dan situs penting untuk hiburan, olahraga, dan agama.

Warisan budaya yang dimaksud adalah warisan budaya yang memiliki karakteristik budaya yang dapat dikembangkan, seperti situs bersejarah, bangunan bersejarah, artefak, wisata ziarah, wilayah pengetahuan, konsentrasi etnik, kerajinan, pabrik dan proses industri, dan taman hiburan.

3. Biaya atau Keuangan

Biaya sangat diperlukan dalam pengembangan pariwisata. Kemudahan memperoleh dukungan finansial untuk pariwisata sangat bervariasi. Selain dukungan finansial dari pemerintah dukungan dari pihak investor atau swasta merupakan pihak yang dapat diandalkan untuk memberikan dukungan finansial

³⁵ Islamiyah Wahyuni. 2018. *Studi Eksploratif tentang Faktor-Faktor Pendukung Pengembangan Kawasan Wisata Religi Makam KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Kabupaten Jombang*. Kebijakan dan Manajemen Publik. Volume 6 nomor 3.

dalam pengembangan pariwisata. Dukungan finansial merupakan faktor penting bagi pengembangan pariwisata milik publik maupun swasta.

Biaya atau keuangan pada penelitian ini merujuk pada sumber dukungan biaya, peran dukungan biaya, dan pertanggungjawaban dalam menggunakan dana atau keuangan.

4. Pihak Swasta

Pihak Swasta dalam Pariwisata merupakan hal yang dinamis, pada pengembangan pariwisata pihak swasta sangat dibutuhkan untuk memvisualisasikan peluang dalam mengembangkan pariwisata selain memvisualisasikan peluang pariwisata, pihak swasta juga memiliki peran sebagai pengelola yang mampu berfikir kreatif dalam mengelola pariwisata yang ada. Selain mengelola peran pihak swasta dalam pengembangan pariwisata juga dapat dilihat dari perancangan pembangunan fisik sektor swasta. Di beberapa negara pihak swasta memiliki peranan yang besar dalam pengembangan dan pembangunan sektor pariwisata.

Pihak Swasta dalam penelitian ini merujuk pada siapa saja yang berperan penting dalam pengembangan pariwisata, peran apa saja yang pihak swasta lakukan dalam mengembangkan pariwisata dan melihat peluang-peluang yang dapat dikembangkan dari sektor wisata.

5. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah merupakan salah satu faktor yang mendukung pengembangan pariwisata. Disini peran dari kebijakan pemerintah adalah sebagai pembuat kebijakan dalam pengembangan pariwisata. Kebijakan tersebut berlaku mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Adanya kebijakan pemerintah yang berupa produk hukum dan undang-undang yang berlaku dapat menjadi sebuah mendorong atau hambatan dalam pengembangan pariwisata. Bagaimana produk hukum atau peraturan dikelola dapat mempengaruhi peraturan dalam pengembangan pariwisata. Selain adanya produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, adanya perkembangan kebijakan mengenai perkembangan infrastruktur oleh pemerintah dapat dijadikan sebagai keuntungan dari satu daerah

dalam mengembangkan sektor pariwisata. Kelancaran sistem pariwisata yang tidak menentu sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang diberlakukan.

Kebijakan pemerintah dalam penelitian ini merujuk pada pedoman dan hukum yang dijadikan acuan dalam acuan atau landasan untuk pengembangan potensi wisata.

6. Tenaga Kerja

Ketersediaan pekerja atau tenaga kerja yang terlatih secara memadai di suatu daerah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pengembangan pariwisata. Keadaan pasar menuntut tingkat layanan yang lebih tinggi, orang-orang yang terlatih dan kompeten berada dalam kebutuhan yang lebih besar. Kapasitas sumber daya manusia atau pekerja sangat berkaitan dengan pengembangan pariwisata.

Tenaga kerja atau pekerja pada penelitian ini merujuk pada sumber daya manusia yang berperan penting dalam proses pengembangan pariwisata. Sistem rekrutmen tenaga kerja, dan bentuk dukungan tenaga kerja.

7. Masyarakat

Faktor yang jauh lebih penting yang mempengaruhi pengembangan pariwisata daripada yang telah dipertimbangkan di masa lalu adalah sikap terhadap pariwisata oleh beberapa sektor masyarakat. Jika sektor bisnis lebih menyukai pertumbuhan pariwisata yang lebih besar, kelompok masyarakat lokal lainnya mungkin menentangnya karena meningkatkan persaingan sosial, fisik, dan ekonomi untuk sumber daya dan dampak negatif lainnya.

Adanya dampak negatif yang ditimbulkan oleh sektor pariwisata membuat masyarakat terkadang memiliki pandangan negatif dengan adanya pengembangan pariwisata, akan tetapi bagi masyarakat lain dengan adanya pengembangan pariwisata menimbulkan dampak yang positif yaitu adanya peningkatan pendapatan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata tidak selamanya menimbulkan adanya dampak yang negatif tetapi juga menimbulkan dampak yang positif bagi masyarakat.

Faktor masyarakat dalam penelitian ini merujuk pada pihak yang berperan penting dalam pengembangan wisat, dampak yang diberikan dari adanya pengembangan pariwisata, dan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pariwisata.

8. Organisasi

Pihak organisasi sangat berperan dalam pengembangan pariwisata, pihak organisasi merupakan penentu dalam perencanaan dan pengembangan suatu daerah tujuan wisata. Perencanaan pariwisata apa pun di masa depan harus mempertimbangkan inti sistem fungsional pariwisata dan banyak faktor yang mempengaruhinya.

Pihak organisasi yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada siapa saja pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata, dan peran apa saja yang dilakukan oleh organisasi dalam pengembangan pariwisata.

1.5.2 Konsep Kolaborasi Stakeholder

1.5.2.1.1 Definisi Kolaborasi

Kata kolaborasi begitu tidak asing dalam kehidupan sehari-hari kita baik di dunia pemerintahan, bisnis maupun dunia politik. secara umum kata kolaborasi memiliki arti sebagai "Proses pengambilan keputusan bersama antara para pemangku kepentingan kunci dari domain masalah tentang masa depan domain yang".³⁶

Menurut pendapat Heritage, kolaborasi diartikan sebagai kegiatan berkerja sama khususnya dalam usaha penyatuan pemikiran³⁷. Hal itu senada dengan pendapat Wood & Gray yang mengemukakan bahwa kolaborasi merupakan suatu proses dimana pihak-pihak yang terlibat melihat suatu permasalahan dari

³⁶ Barbara ,Gray. 1989. *Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems*. San Fransisco: Jossey-Bass.

³⁷Badan Diklat DIY. (2014). *Koordinasi dan Kolaborasi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (Diakses melalui <http://diklat.jogjapro.go.id> pada tanggal 19 Maret tahun 2019 ,pukul 19.25 WIB)

perspektif atau aspek yang berbeda dapat secara konstruktif mempertemukan perbedaan dan mencari solusi lebih jauh dari pandangan mereka.³⁸

Anshell dan Gash memberikan definisi yang berbeda terhadap *collaborative governance* yaitu sebagai bentuk pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih agensi publik secara langsung mengikutsertakan *stakeholders* non-pemerintah dalam suatu proses pembuatan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif serta bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau asset. Seperti yang diungkapkan dalam pernyataan berikut:

*“A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision making process that is formal, consensus oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public program or assets.”*³⁹

Dalam kolaborasi pemerintahan, menurut Ansell dan Gash bahwa komunikasi tatap muka (*face-to-face*) mutlak diperlukan untuk membangun kepercayaan yang kemudian dapat meningkatkan komitmen dari lembaga publik maupun stakeholder non pemerintah. Komitmen tersebut ditandai dengan pengakuan saling ketergantungan, berbagi kepemilikan proses, dan pemahaman mewujudkan tujuan bersama. Kepercayaan dan komitmen ini yang kemudian disebut Ansell dan Gash sebagai umpan balik yang positif.

Hal senada juga diungkapkan oleh Edward M. Marshal dalam bukunya *Transforming The Way We Work: The Power of The Collaborative Work Place* yang berpendapat bahwa kolaborasi adalah proses yang mendasar dari bentuk kerja sama yang melahirkan kepercayaan, integritas, dan terobosan melalui pencapaian konsensus, kepemilikan, dan keterpaduan pada semua aspek organisasi. Seperti yang diungkapkan dalam pernyataan berikut.

³⁸ Wood, Donna J dan Barbara Gay. 1991. *Towards a Comprehensive Theory of Collaboration*. Journal of Applied Behavioral Science. Vol.27, hlm :139-162.

³⁹ Ansell, Chris dan Gash, Alison, 2008, *Collaborative Governance in Theory and Practice*, Journal of Public Administration Research and Theory. Vol. 18 No. 4. hlm:544

*“It is a principle based process of working together, which produces integrity and breakthrough result by building true consensus, ownership, and alignment in all aspects of the organization”.*⁴⁰

Menurut Thomson dan Perry mengemukakan pendapat bahwa kolaborasi sebagai proses dimana aktor yang memiliki wewenang otonom berinteraksi melalui negosiasi formal dan informal, bersama-sama untuk menciptakan aturan dan struktur yang mengatur hubungan dan cara bertindak atau memberikan keputusan atas isu-isu yang membawa mereka dalam keharusan kebersamaan.⁴¹

Sedangkan menurut Emily R. Lai menjelaskan bahwa kolaborasi adalah keterlibatan bersama dalam upaya terkoordinasi untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Interaksi kolaboratif ditandai dengan tujuan bersama, struktur yang simetris dengan negosiasi tingkat tinggi melalui dan adanya saling ketergantungan.⁴²

Dalam buku Bahan Ajar Diklat Koordinasi dan Kolaborasi yang diterbitkan oleh badan Diklat Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, mendefinisikan kolaborasi sebagai bentuk kerja sama, interaksi, kompromi dari beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat.

Berdasarkan berbagai definisi kolaborasi yang telah dijelaskan para ahli, maka konsep kolaborasi yang sesuai dengan konteks penelitian ini adalah suatu proses kerja sama antar para aktor yang memiliki wewenang untuk memecahkan masalah secara bersama-sama dengan cara berkoordinasi melalui komunikasi untuk meningkatkan komitmen dari lembaga publik maupun stakeholder non pemerintah.

Menurut Abdulsyani, kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial, dimana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-

⁴⁰ Edward M. Marshal. (1995). *Transforming The Way We Work: The Power of The Collaborative Work Place*. American Association Management (AMACOM)

⁴¹ Thomson AM, Perry JL.(2006).*Collaboration Processes, Inside the Black Box*. Public Administration.

⁴² Emily R. Lai, (2011). *Collaborations: A Literature Review*, (Pearson,), hlm:2

masing.⁴³ Pendapat lain diungkapkan oleh London menurutnya dalam kolaborasi terdapat beberapa karakteristik dasar yang ada pada kolaborasi. Karakteristik dasar itu sebagai berikut:

1. Aktor yang berkolaborasi dapat mengatasi perbedaan pendapat dalam mendefinisikan permasalahan.
2. Para aktor memiliki perbedaan kepentingan, namun saling bergantung satu sama lain.
3. Para aktor tidak selalu bersikap apriori atau sistematis.
4. Terdapat kemungkinan adanya kesenjangan kekuatan/daya antar para aktor dalam mengatasi suatu masalah.
5. Para aktor memiliki keahlian dan akses informasi yang berbeda pada masalah-masalah yang berbeda pula.
6. Masalah yang muncul sering ditandai dengan kompleksitas dan ketidakpastian ilmiah.
7. Perbedaan perspektif dalam mengatasi permasalahan sering menjadi pemicu permusuhan antar aktor.
8. Adanya inkremental atau upaya sepihak untuk menangani permasalahan biasanya kurang menghasilkan daripada kepuasan solusi.
9. Proses yang ada untuk mengatasi permasalahan terbukti tidak cukup dalam mengatasi permasalahan.⁴⁴

1.5.2.1.2 Tipe-Tipe Kolaborasi

Menurut pendapat Agranoff menjelaskan bahwa dalam kolaborasi terdapat beberapa tipe kolaborasi yang didasarkan pada level aktivitas gabungan dalam suatu wilayah dan sejauh mana aktivitas seperti itu dinilai strategis. Oleh karena

⁴³ Bahan Pembelajaran Diklat Kepemimpinan Aparatur Pemerintah Tingkat IV. (2015). Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Diakses melalui <https://bppk.kemenkeu.go.id/>

⁴⁴ Scott London, Collaboration and Community, di unduh dari <http://www.scottlondon.com/reports/collaboration.pdf> pada tanggal 13 maret 2019 pukul 15.10 WIB

itu, tipe pengelolaan kolaboratif yang dominan pada suatu wilayah dapat diukur dari dimensi aktivitas dan dimensi strategi. Tipe-tipe kolaborasi tersebut adalah:⁴⁵

1. Tipe *Top-Down* merupakan tipe kolaborasi yang menekankan pengendalian berdasarkan ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat dan interaksi antar aktor dibuat berdasarkan aturan hukum. Jadi, kolaborasi sangat dipengaruhi oleh pemerintah pusat.
2. Tipe *Donor-Recipient* merupakan tipe kolaborasi yang menekankan pada proses konsensus dengan aktor diluar kolaborasi. Jadi, kolaborasi sangat dipengaruhi oleh aktor diluar kolaborasi.
3. Tipe *Jurisdiction Based Strategic* merupakan tipe kolaborasi yang mendukung berbagai strategi yang diputuskan oleh pemimpin kolaborasi. Jadi, kolaborasi sangat dipengaruhi oleh aktor internal yang berperan penting dalam kolaborasi.
4. Tipe Kolaborasi dengan bentuk pemerintahan jejaring merupakan tipe kolaborasi yang digunakan untuk penyesuaian dan tindakan bersama di antara pemerintah yang saling bergantung pada organisasi.

1.5.2.1.3 Komponen Kolaborasi

Dalam sebuah kolaborasi untuk dapat mengetahui suatu kolaborasi tersebut berhasil atau tidak terdapat komponen-komponen yang menjadi faktor pendukung keberhasilan kolaborasi . Komponen-komponen tersebut saling diharapkan mampu melengkapi satu sama lain, sehingga kolaborasi yang terjadi akan berhasil apabila memenuhi semua komponen.

Suatu komponen kolaborasi disusun atas berbagai elemen dasar kolaborasi yang membentuk suatu rangkaian tertentu.⁴⁶ Komponen *collaborative governance* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah deskripsi atas hubungan kausal elemen kolaborasi yang terjadi secara berulang membentuk suatu kerangka kerja untuk

⁴⁵ Robert Agranoff dan Michael McGuire. (2003). *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments*. Washington. Georgetown University Press. Hlm:43

⁴⁶ Ann Marie Thompson & James L. Perry. (2006). *Collaboration Processes: Inside the Black Box*, paper presented on Public Administration. Vol.2 No.66.Academic Research Library. Hlm: 20

menggambarkan sebuah kolaborasi. Komponen *collaborative governance* dalam literatur lainnya diberikan istilah yang beragam, yang diperjelas dalam kutipan berikut:

“Integrative framework for collaborative process, themes in collaboration practice, a process framework of collaboration, dan the antecedent-process-outcome framework.”

Menurut pendapat Grey dalam kolaborasi melibatkan beberapa komponen yang dapat menjadi pendukung keberhasilan kolaborasi. Komponen-komponen tersebut yaitu:⁴⁷

1. Saling ketergantungan.
2. Penyatuan pemikiran secara konstruktif untuk mencapai solusi.
3. Keputusan bersama semua aktor.
4. Tanggung jawab bersama.

Akan tetapi pendapat berbeda dikatakan oleh Menurut Healey, kolaborasi memerlukan strategi melalui tiga modal, yakni⁴⁸ (1) Modal sosial yang terdiri dari kepercayaan, komunikasi, dan kemauan bertukar pikiran. (2) Modal intelektual yang terdiri dari pemahaman dan (3) Modal politik yang terdiri dari perjanjian dan proyek formal maupun informal.

Berikut ini akan dijelaskan komponen-komponen kolaborasi menurut Robert Agranoff dan Michael McGuire, Ansell dan Gash, Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh dan John D. Donahue dan Richard Zeckhauser

a. Robert Agranoff dan Michael McGuire

Agranoff dan McGuire memandang kolaborasi sebagai aktivitas-aktivitas yang bersifat horizontal dan vertikal. Kemudian, aktivitas tersebut dianalisis melalui komponen-komponen sebagai berikut:⁴⁹

1. Komunikasi

⁴⁷Patsy, Healey. (1996). *Consensus-building Across Difficult Division: New Approaches to Collaborative Strategy Making*. Vol.1 No.2.

⁴⁸ Sufianti Ely, Sawitir Dewi, Nur Krishnai, Dan Firman Tommy. (2013). *Proses Kolaboratif Dalam Perencanaan Berbasis Komunikasi Pada Masyarakat Non Kolaboratif*. Jurnal Pengembangan Kebijakan. Vol29 No.2.

⁴⁹ Agranoff, Robert dan Michael McGuire. (2003). *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments*. Washington DC. Georgetown University Press. Hlm : 4-18

Komunikasi yang intensif sangatlah penting dalam kolaborasi. Komunikasi di era modern ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung dapat melalui perantara teknologi. Sedangkan komunikasi langsung dilakukan dengan cara bertatap muka melalui pertemuan atau rapat bersama. Akan tetapi di era saat ini komunikasi lebih intensif dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui perantara teknologi. Hal tersebut dilakukan karena berbagai alasan diantaranya:

1. Jika sesama aktor kolaborasi memiliki tingkat kesibukan yang tinggi, maka penggunaan teknologi akan memudahkan komunikasi.
2. Jika individu pada masing-masing aktor memiliki keahlian penggunaan teknologi yang berbeda maka strategi penggunaan teknologi harus lebih jelas.
3. Jika ada ketimpangan kekuatan, maka perlu ada teknologi komunikasi yang mampu menyembunyikan identitas aktor, dan
4. Adanya *bounded rationality* atau keterbatasan informasi dalam pembuatan keputusan bersama maka teknologi dapat diatasi melalui penggunaan teknologi sehingga penyajian dan perbandingan data menjadi lebih akurat dan dapat mengurangi kesalahan logis dalam suatu pembuatan keputusan.

2. Nilai tambah

Nilai tambah yang dimaksud adalah nilai yang dihasilkan dari adanya demokrasi dalam institusi dan adanya proses kolaborasi yang dalam praktiknya menghasilkan kesetaraan, keadilan dalam pemerintahan. Adanya nilai tambah dalam kegiatan kolaborasi dicerminkan melalui:

- a. Identifikasi permasalahan bersama, pertukaran informasi sehingga terdapat alternatif alternative solusi yang benar-benar dibutuhkan.
- b. Penemuan dan penggunaan teknologi yang tepat guna.
- c. Adaptasi terhadap penggunaan teknologi baru.
- d. Pembangunan knowledge dan menjadikannya berguna.
- e. *Capacity building* antar sektor.
- f. Terciptanya kebijakan bersama sebagai hasil dari kompleksitas kolaborasi sehingga bersifat deliberatif dan terbuka. Beragam nilai tambah yang muncul

dalam kolaborasi diatas secara tidak langsung membentuk nilai publik yang diharapkan.

3. Deliberasi

Deliberasi merupakan keuntungan dari melakukan suatu pekerjaan secara kolaborasi yang membentuk pembelajaran saling menguntungkan (*Mutual Learning*), pembangunan komunitas (*Community Building*), pemanfaatan proses interaktif (*Employing Interactive Process*). Melakukan delibarasi tentu harus tetap berpegang pada norma-norma dan peraturan kolaborasi yang telah disepakati bersama. Kesimpulan model *collaborative governance* Agranoff & McGuire adalah aktivitas yang dianalisis melalui komponen komunikasi, nilai tambah, dan deliberasi. *Collaborative Governance* bukan merupakan suatu hierarki, melainkan *Collaborarchy*, yaitu karakteristik jejaring yang di dalamnya hubungan antar aktor adalah kompleks.

b. Chris Ansell dan Alison Gash

Komponen *Collaborative Governance* menurut Anshell dan Gash mempunyai 4 komponen yang meliputi kondisi permulaan, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses yang kolaboratif. Dalam proses kolaborasi komponen-komponen tersebut yang dibagi lagi ke dalam beberapa elemen kolaborasi.⁵⁰

A. Kondisi Pemula

Kondisi permulaan adalah keadaan yang menggambarkan tingkat kepercayaan, ada tidaknya konflik, modal sosial yang menjadi sumber daya, dan kewajiban selama berkolaborasi. Sebagai titik awal kolaborasi harus mampu mengatasi masalah ketidakpercayaan, ketidakpedulian, dan antagonisme (konflik) antar *stakeholders* karena kolaborasi tidak selalu terjadi pada *stakeholders* yang awalnya memiliki visi bersama. Kondisi permulaan memiliki tiga komponen yaitu: (1) ketidakseimbangan sumber daya atau perbedaan kekuatan *stakeholders*, (2) insentif kolaborasi, (3) riwayat konflik atau kerja sama diantara para *stakeholders* yang pernah terjadi di masa lalu.

⁵⁰ Chris Anshell dan Alison Gash. *Op.Cit.*. Halaman 548-561

1. Ketidakseimbangan sumber daya

Suatu kolaborasi, pasti terdapat ketidakseimbangan kapasitas, organisasi, status, atau sumber daya antar stakeholders sehingga proses pengelolaan kolaboratif cenderung terjadi dominasi oleh aktor yang lebih kuat. Masalah ketidakseimbangan sumber daya terjadi ketika beberapa *stakeholders* tidak memiliki infrastruktur organisasi yang dibutuhkan dalam kolaborasi. Selain itu masalah umum yang muncul dalam kolaborasi biasanya beberapa *stakeholders* mungkin tidak memiliki keahlian untuk terlibat dalam diskusi tentang masalah teknis dan tidak memiliki waktu, energi, atau kebebasan untuk terlibat dalam proses kolaborasi yang intensif. Jika ada ketidakseimbangan kekuatan/sumber daya yang signifikan antar *stakeholders*, dikhawatirkan tidak optimalnya peran stakeholder yang berpartisipasi secara nyata, maka dalam kolaborasi.

2. Insentif untuk kolaborasi

Insentif kolaborasi dapat dirasakan apabila para *stakeholders* mampu mencapai tujuan mereka setelah adanya kolaborasi. Kolaborasi hanya akan berjalan jika pemangku kepentingan menganggap dirinya saling bergantung satu sama lain dan dalam mencapai tujuan mereka tidak bisa bertindak sendiri. Jadi insentif kolaborasi akan dirasakan setelah adanya asumsi saling ketergantungan antar *stakeholders*.

3. Riwayat konflik atau kerja sama antar *stakeholders*

Jika ada sejarah antagonisme (konflik) di antara para stakeholders, maka kolaborasi tidak mungkin berhasil kecuali jika: (a) ada tingkat saling ketergantungan yang tinggi di antara para pemangku kepentingan atau (b) langkah positif diambil untuk memperbaiki tingkat kepercayaan yang rendah di antara para pemangku kepentingan.

B. Kepemimpinan yang Fasilitatif

Kepemimpinan dalam kolaborasi di sini berperan sebagai pembuatan aturan dasar kolaborasi, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog antar stakeholder dalam kolaborasi, dan mengeksplorasi kesamaan tujuan diantara

stakeholders. Selain sebagai pembuat kebijakan atau aturan dasar dalam kolaborasi kepemimpinan juga memiliki peran aktif dalam memberdayakan dan merespresentasikan *stakeholders* yang lemah posisinya dalam kolaborasi. *Collaborative governance* akan sukses jika ada pemimpin yang mengutamakan rasa menghargai dan mempercayai masing-masing *stakeholders* yang berbeda karakteristik dan kepentingannya. Pemimpin adalah pemimpin yang muncul dari komunitas stakeholder itu sendiri.

C. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan merujuk pada aturan dasar dalam melakukan kolaborasi dan juga sebagai hal yang digunakan untuk mengukur legitimasi proses kolaborasi. Keberhasilan kolaborasi dapat dilihat dari inklusifitas *stakeholder* secara luas baik yang terlibat karena terpengaruh atau dipengaruhi. Selain desain kelembagaan partisipasi dan transparansi juga dapat digunakan sebagai desain kelembagaan untuk menguatkan legitimasi dan membangun kepercayaan dari masyarakat. Kedua hal diatas sesuai dengan prinsip kolaborasi yang menekankan pada *consensus-oriented*. Desain kelembagaan yang ketiga adalah adanya tenggat waktu yang dipicu oleh organisasi dalam melakukan kolaborasi. Hal ini diharapkan dari tenggat waktu yang diberikan maka akan ada target yang akan dicapai dalam kolaborasi.

D. Proses Kolaboratif

Kolaborasi dipandang sebagai proses kerja sama yang baik dengan adanya komunikasi, kepercayaan, komitmen, pemahaman, dan dampak. Proses yang kolaboratif akan dijelaskan melalui tahapan-tahapan yang membentuk suatu siklus yang mempengaruhi satu sama lain dan diawali dari tahap dialog antarmuka. Inti dari proses yang kolaboratif adalah *collectively decision making*.

1. Dialog antar-muka

Proses kolaboratif diawali dari dialog antarmuka masing-masing stakeholders atau sering dikatakan komunikasi secara langsung. Sebagai suatu proses yang *consensus oriented*, tahapan ini penting untuk mengidentifikasi

peluang dan tujuan untuk dicari kesepakatannya. Dialog antarmuka ini tidak hanya sekadar cara untuk bernegosiasi tetapi inti dari proses ini untuk menghilangkan persepsi buruk aktor yang satu terhadap aktor yang lain. Dialog antarmuka dapat dikatakan sebagai suatu komunikasi mempengaruhi proses membangun kepercayaan, rasa menghargai, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses kolaborasi.

2. Kepercayaan

Kepercayaan adalah salah syarat wajib yang harus ada dalam kolaborasi. Artinya proses *collaborative governance* tidak hanya membahas tentang negosiasi antar stakeholders tetapi juga tentang bagaimana membangun kepercayaan diantara mereka. Dalam hal ini peran seorang pemimpin dalam proses *collaborative governance* harus mampu menyadarkan bahwa mereka harus membangun kepercayaan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam kolaborasi. Jika diantara stakeholders tidak mampu membangun kepercayaan, maka strategi-strategi kolaboratif tidak akan dapat berjalan.

3. Komitmen

Komitmen berkaitan dengan motivasi awal untuk berpartisipasi dalam proses *collaborative governance*. Motivasi stakeholders melakukan kolaborasi karena pekerjaan mereka sulit untuk dilakukan sendiri atau untuk mendapatkan legitimasi atas posisi mereka atau bisa juga hanya untuk memenuhi kewajiban hukum. Komitmen terhadap proses juga bisa diartikan sebagai tindakan mengembangkan keyakinan bahwa musyawarah untuk keuntungan bersama adalah cara terbaik untuk mencapai hasil kebijakan yang diinginkan. Komitmen dipengaruhi oleh adanya mengenali bersama dan apresiasi bersama dan rasa memiliki terhadap proses. Rasa memiliki terhadap proses kolaborasi hanya bisa dibangun dengan adanya keterlibatan atau partisipasi dan berbagi tanggung jawab dalam kolaborasi. Komitmen terhadap proses kolaboratif juga ditandai dengan adanya saling ketergantungan yang tinggi diantara stakeholders.

4. Pemahaman Bersama

Pemahaman bersama memiliki makna yang berbeda-beda dalam literatur lain pemahaman bersama dianggap sebagai misi umum, tujuan umum, dasar bersama, atau visi bersama. Pemahaman bersama dimaksudkan sebagai penyatuan tujuan dan pendefinisian permasalahan secara bersama-sama sehingga meminimalisir terjadinya kesalahpahaman diantara stakeholders.

5. Dampak Sementara

Dampak sementara merupakan hasil akhir atau outcomes dari proses kolaborasi, bukan merujuk pada outcomes atau hasil akhir keseluruhan sistem kolaborasi. Tetapi dampak sementara atau hasil dari proses kolaborasi dapat menjadi momentum atau titik kritis menuju keberhasilan kolaborasi itu sendiri. Dampak sementara yang positif dapat di maknai sebagai small wins atau kemenangan kecil dari kolaborasi.

Melihat penjelasan yang telah diuraikan diatas peneliti menyimpulkan bahwa kolaborasi menurut Ansell dan Gash menggunakan klasifikasi elemen kolaborasi ke dalam elemen inti dan elemen pendukung yang bergantung pada pengaruh elemen tersebut dalam kolaborasi. Kunci dari model *collaborative governance* Anshell dan Gash adalah melihat kolaborasi dari sisi motivasi, ketidakseimbangan, konflik, kepemimpinan, desain kelembagaan, komunikasi, kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, dan dampak sementara dengan menekankan pada waktu, kepercayaan, dan saling ketergantungan.

c. Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh

Emerson, Nabatchi dan Balogh mengembangkan sebuah kerangka integratif *collaborative governance* yang di dalamnya dijelaskan dimensi-dimensi yaitu *collaborative governance regime/ CGR seperti drivers, system context, dan impact or adaptation*. *Collaborative Governance Regime (CGR)* merupakan inti dari komponen *collaborative governance* Emerson, Nabatchi, dan Balogh yang

kemudian dibagi lagi ke dalam *collaborative dynamics dan collaborative actions*.⁵¹

1. Dinamika kolaborasi (*Collaborative Dynamics*)

Tahapan dalam dinamika kolaborasi dilihat sebagai interaksi atau berulang yang meliputi penggerak prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama yang saling mempengaruhi

a. Penggerak Prinsip Bersama (*Principled Engagement*)

Penggerak prinsip bersama adalah proses yang senantiasa berulang dan melibatkan aktor yang berbeda pada waktu yang sama dengan cara-cara seperti dialog antarmuka, jaringan lintas organisasi, maupun dengan pertemuan antara publik-privat atau cara-cara yang lain. Melalui penggerak prinsip bersama terjadi penegasan kembali tujuan bersama, dan pembentukan serta pengembangan prinsip-prinsip bersama sehingga inti dari penggerak prinsip bersama adalah penyatuan prinsip dan tujuan. Penggerak prinsip bersama terjadi melalui pengulangan empat elemen dasar yaitu pengungkapan (*discovery*), definisi, deliberasi, dan determinasi.

1. Pengungkapan

Pengungkapan adalah penyampaian kepentingan, perhatian, dan nilai individu dan nilai bersama. Pada awalnya, pengungkapan dapat digunakan untuk mengidentifikasi kepentingan bersama.

2. Definisi

Proses pendefinisian ditandai dengan upaya terus menerus untuk membangun makna bersama dengan mengartikulasikan tujuan dan sasaran bersama, menyetujui konsep dan terminologi akan digunakan para stakeholders untuk mendeskripsikan dan mendiskusikan masalah dan peluang kolaborasi, mengklarifikasi dan menyesuaikan tugas dan harapan satu sama lain, serta menetapkan kriteria bersama untuk menilai informasi dan alternatif tindakan.

⁵¹ Emerson, Kirk. et.al. (2012). *An Integrative Framework for Collaborative Governance*. Journal of Public Administration Research and Theory. Vol.22 No.1.

3. Deliberasi

Deliberasi atau yang dikenal dengan Musyawarah, atau komunikasi yang jujur dan beralasan, dianggap sebagai ciri dan unsur penting dari penggerak prinsip bersama yang sukses. Kualitas musyawarah, terutama bila peserta memiliki kepentingan dan perspektif yang berbeda, bergantung pada pemimpin kolaborasi yang peka terhadap kepentingan individu, kepentingan yang diwakili, efektivitas strategi dan adanya konflik.

4. Determinasi

Serangkaian tindakan untuk menetapkan maksud dan tujuan yang diinginkan yang dibedakan menjadi determinasi bersama (*joint determinations*) dan *substantive determinations*. Determinasi bersama meliputi keputusan prosedural seperti agenda kerja, diskusi, dan penugasan sebuah kelompok kerja. Sedangkan determinasi substantif sering dianggap sebagai salah satu output atau produk akhir kolaborasi seperti kesepakatan mengenai tindakan atau rekomendasi akhir.

b. Motivasi Bersama (*Shared Motivation*)

Motivasi bersama diartikan sebagai siklus penguatan atas kepercayaan bersama, pemahaman bersama, legitimasi internal, dan komitmen. Ketiga elemen kecuali legitimasi telah ada dalam model collaborative governance Ansell dan Gash. Seperti yang digambarkan oleh roda penggerak, motivasi bersama melakukan sebuah siklus sendiri dan sebelumnya dipengaruhi oleh penggerak prinsip bersama.

1. Kepercayaan Bersama (*Mutual Trust*)

Pembentukan kepercayaan bersama artinya harus ada rasa percaya di setiap aktor kolaborasi. Kepercayaan dibangun dengan upaya terus menerus dari interaksi para aktor untuk saling mengetahui satu sama lain dan membuktikan sendiri kelayakan untuk dipercaya. Kepercayaan juga dipengaruhi saling ketergantungan antar aktor, hubungan antar aktor di luar kolaborasi dan pengalaman melakukan kolaborasi dengan aktor yang lain.

2. Pemahaman Bersama (*Mutual Understanding*)

Pemahaman bersama (*Mutual Understanding*) di sini berbeda dengan *shared understanding* yang dijelaskan oleh Ansell dan Gash. *Shared understanding* merujuk pada persetujuan setiap partisipan kolaborasi untuk berbagi serangkaian nilai dan tujuan. Sedangkan *mutual understanding* merujuk pada kemampuan untuk memahami dan menghargai kedudukan dan kepentingan pihak lain ketika salah satu pihak tidak setuju. Pemahaman bersama seringkali dipengaruhi oleh kepercayaan yang telah terbentuk sebelumnya.

3. Legitimasi Internal (*Internal Legitimacy*)

Legitimasi internal adalah pengakuan dari pihak-pihak internal kolaborasi bahwa aktor-aktor yang terlibat dapat dipercaya dan kredibel dalam melakukan tugas dan perannya dalam kerangka kolaborasi. Legitimasi internal ini penting karena merupakan elemen untuk membentuk komitmen bersama.

4. Komitmen (*Shared Commitment*)

Komitmen mampu menghilangkan hambatan yang muncul karena perbedaan karakteristik dan kepentingan antar aktor. Komitmen dalam model CGR ini serupa dengan *commitment to the process* dalam komponen *collaborative governance* yang dikatakan oleh Anshell dan Gash.

c. Pengembangan Kapasitas

Kolaborasi merupakan cara untuk mewujudkan tujuan yang tidak dapat atau sulit dicapai sendiri. Namun, aktor kolaborasi tidak selalu memiliki kapasitas yang sama untuk bertindak bersama dalam rangka mencapai tujuan karena adanya perbedaan dan kesenjangan kekuatan. Dengan demikian, kolaborasi harus menghasilkan kapasitas baru untuk tindakan bersama yang tidak ada sebelumnya dan mempertahankan atau menumbuhkan kapasitas tersebut selama proses kolaborasi. Pengembangan kapasitas yang diperlukan ditentukan selama proses penggerak prinsip. Kapasitas baru ini menjadi bentuk pemberdayaan kelompok sebagai perwujudan prinsip demokrasi yang mendasari kolaborasi. Terdapat 4

elemen penting yang terdapat dalam pengemabngan kolaborasi yaitu pengaturan prosedural dan kelembagaan, kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya.

1. Pengaturan prosedural dan kelembagaan

Pengaturan prosedural dan struktur kolaborasi dibutuhkan dalam mengatur interaksi antar aktor kolaborasi. Dimensi-dimensi pengaturan prosedural adalah aturan-aturan umum, protokol dalam kegiatan, peraturan untuk membuat keputusan dan segala aturan berkaitan dengan prosedur.

2. Pengaturan kelembagaan

Pengaturan kelembagaan berfokus pada intra organisasi dan inter organisasi. Intra organisasi yaitu pada cara-cara aktor melakukan governing dan mengatur organisasinya sendiri dalam kegiatan kolaborasi sedangkan inter organisasi yaitu pada cara-cara kelompok kolaborasi mengatur proses dan bagaimana kolaborasi berintegrasi dengan pembuat keputusan dari pihak luar. Struktur kolaborasi yang baik adalah yang fleksibel, tidak hirarki dan cenderung bersifat jejaring dengan kepemimpinan dari aktor pemerintah. Untuk kolaborasi yang lebih besar dan kompleks serta durasi waktu yang cukup panjang maka struktur kelembagaan organisasi harus jelas dan harus ada pengaturan untuk administrasi dan manajemen kegiatan kolaborasi yang jelas pula.

3. Kepemimpinan

Peran pemimpin selama proses kolaborasi adalah sebagai pihak yang menggali dukungan untuk kolaborasi, fasilitator dan mediator, representasi aktor kolaborasi secara keseluruhan, distribusi pengetahuan, mendorong penggunaan teknologi, dan melakukan advokasi terhadap publik. Selain itu, peran pemimpin yang juga penting dalam mendorong deliberasi, mengatasi konflik, dan meningkatkan determinasi para aktor terhadap tujuan kolaborasi.

4. Pengetahuan

Pengetahuan kombinasi dari informasi untuk menambah kapabilitas. Pengetahuan sangat mempengaruhi tindakan kolaborasi. Yang terpenting dari komponen ini adalah bagaimana mendistribusikan pengetahuan kepada para aktor

kolaborasi sehingga pengetahuan tersebut dapat bermanfaat sebagai nilai tambah untuk proses kolaborasi.

5. Sumber daya

Salah satu keuntungan kolaborasi adalah potensi untuk berbagi sumber daya yang tidak dimiliki dalam melakukan suatu hal. Sumber daya yang berguna dapat mencakup pendanaan, waktu, dukungan teknis dan logistik, bantuan administratif dan organisasi, keterampilan yang diperlukan untuk analisis atau implementasi dan keahlian lainnya. Kekuasaan juga dapat dipandang sebagai sumber daya karena seperti sumber daya lainnya, kekuasaan hampir selalu didistribusikan secara tidak merata ke seluruh peserta.

2. Tindakan Kolaborasi

Tindakan-tindakan dalam kolaborasi sangat bervariasi dan bergantung pada *collaborative dynamics*. Sebaliknya, hasil daripada tindakan kolaborasi merupakan dampak sementara yang juga akan mempengaruhi *collaborative dynamics* dan mengarahkan pada dampak jangka panjang. Selain itu hasil tindakan kolaborasi akan bergantung pada konteks dan biaya, mungkin juga bergantung pada: dukungan, kebijakan, hukum, peraturan, sumber daya, staff, ijin, manajemen, dan pengawasan.

Kesimpulan model *collaborative governance* Emerson, Nabatchi, dan Balogh yang dikenal sebagai model CGR ini tersusun atas 2 variabel yaitu *collaborative dynamics* dan *collaborative actions*. Baik tidaknya *collaborative dynamics* bergantung pada tiga komponen yaitu penggerak prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama yang masing-masing komponen tersebut memiliki beberapa elemen yang saling mempengaruhi. Kegiatan saling mempengaruhi antar komponen tersebut menghasilkan suatu tindakan kolaborasi yang merupakan dampak sementara dari kolaborasi.

d. John D. Donahue dan Richard Zeckhauser

Menurut Donahue dan Zeckhauser istilah yang menggambarkan komponen *collaborative governance* adalah *task & tools* yang berarti tugas dan

instrumen. Tugas (*tasks*) menggambarkan kegiatan kolaborasi yang beragam dan dapat dianalisis menggunakan elemen monitor dan motivate. Sedangkan instrumen (*tools*) menggambarkan elemen analyze, assign, design, dan assess yang membentuk pola siklus kolaborasi.⁵² Komponen kolaborasi menurut Donahue dan Zeckhauser yaitu :

1. Tugas (*tasks*) dalam kolaborasi

a. Monitoring

Kegiatan mentoring dapat berupa inspeksi, evaluasi, penilaian, pengawasan dan hasilnya berupa laporan kegiatan. Ada variasi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan monitoring, diantaranya:

- a. Setiap anggota kolaborasi.
- b. Tim khusus di luar kolaborasi.
- c. Tim monitoring pada tingkatan tertentu, dan
- d. Tim pihak ketiga menentukan kegiatan monitoring yang didasarkan pada kondisi, karakteristik dan kapabilitas aktor kolaborasi utamanya pemerintah, serta keahlian yang dibutuhkan.

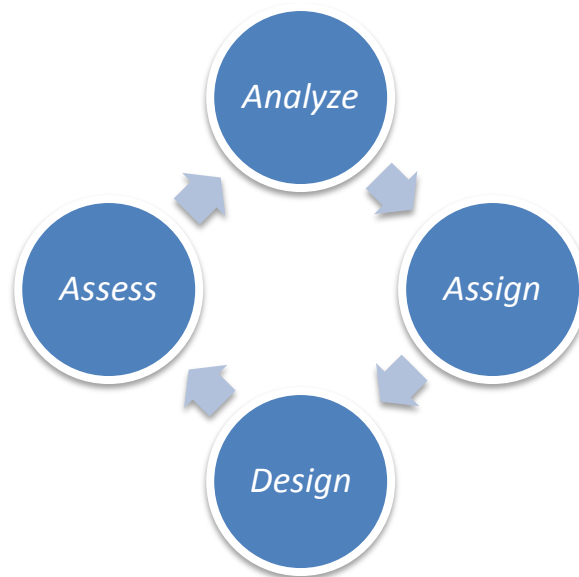
b. Motivasi

Motivasi adalah hal penting yang muncul atas adanya sistem rewards (penghargaan). *Rewards* adalah insentif yang diberikan dalam bentuk materi maupun pemberian peran penting dan tanggung jawab yang lebih besar pada sektor swasta. *Rewards* diberikan melalui dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. *Rewards* langsung diberikan berdasarkan kinerja aktor kolaborasi, dan khusus pada sektor swasta dapat berupa tanggung jawab yang lebih besar. Motivasi yang digunakan untuk mengurangi dampak buruk adalah pemberian punishment (hukuman). Motivasi dalam hal ini ditujukan kepada semua aktor, namun yang lebih berperan adalah pemerintah.

2. Instrumen (*tools*) dalam kolaborasi

⁵² John D. Donahue dan Richard J. Zeckhauser. (2011). *Collaborative Governance: Private Roles for Public Goals in Turbulent Times*. United Kingdom : Princeton University Press. Hlm 207-239

Instrumen dalam kolaborasi terdiri dari analisis, penetapan, desain dan penilaian yang saling mempengaruhi satu sama lain sehingga membentuk siklus kolaborasi sebagaimana digambarkan berikut.



Gambar 1. 2 Siklus Kolaborasi Donahue dan Zeckhauser

Sumber: John D. Donahue dan Richard J. Zeckhauser. 2011. *Collaborative Governance: Private Roles for Public Goals in Turbulent Times*. United Kingdom: Princeton University Press. Hal 207-239

a. *Analyze*

Analisis dilakukan untuk mengetahui tujuan dan harapan masing-masing aktor kolaborasi yang ingin dicapai. Analisis sangat berguna untuk penentuan struktur yang tepat bagi kolaborasi. Analisis dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana cara agar suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih baik atau juga bisa dilakukan dengan membandingkan terhadap praktik kolaborasi yang lain. Hasil yang diperoleh dari kegiatan analisis adalah gambaran permasalahan secara menyeluruh beserta kerangka solusinya. Analisis dilakukan oleh seluruh aktor terutama dalam penentuan tindakan kolaborasi.

b. *Assign*

Assign (penetapan) meliputi kegiatan pada awal kolaborasi yang penting salah satunya adalah penentuan rekan atau aktor-aktor yang nantinya terlibat

dalam kolaborasi serta penetapan tujuan bersama. Meskipun begitu, penetapan ulang aktor kolaborasi dimungkinkan ketika kolaborasi itu sendiri sedang berjalan. Selain itu, penetapan juga berkembang menjadi pembuatan keputusan bersama mengenai berbagai macam kegiatan kolaborasi.

c. Design

Desain peran dan tanggung jawab masing-masing aktor (dengan melihat hasil analisis yang sebelumnya telah dilakukan) dilakukan pada tahap ini. Selain itu, desain juga harus mempertimbangkan efektivitas desain yang dipilih. Pengaruh tugas (tasks) sangat besar dalam hal ini karena apabila tingkat perbedaan kepentingan antar aktor tergolong rendah, maka analisis tujuan akan lebih mudah lebih lanjut akan memudahkan desain peran dan tanggung jawabnya.

d. Assess

Assess (penilaian) merupakan kegiatan untuk memastikan kolaborasi berjalan seperti seharusnya. Penilaian dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan melakukan *survey*. Penilaian dilakukan dengan didasarkan pada indikator-indikator kinerja kolaborasi (komunikasi, kepercayaan, komitmen, insentif, dan sebagainya). Hasil penilaian menjadi rekomendasi-rekomendasi untuk perubahan maupun menjadi suatu bentuk revisi terhadap masa lalu, bahkan juga dapat digunakan untuk menilai apakah tujuan kolaborasi masih relevan dengan keadaan yang ada.

Kesimpulan *collaborative governance* menurut Donahue dan Zeckhauser memandang kolaborasi dari variabel tasks dan tools dan cenderung berfokus untuk mempertimbangkan aktivitas-aktivitas apa saja yang harus dilakukan atau seharusnya ada dalam kolaborasi. *Tasks* terdiri dari mentoring dan motivasi sebagai komponen yang menjaga kolaborasi tetap layak untuk dilakukan dan *tools* sebagai siklus kolaborasi yang menggambarkan proses-proses yang harus ada dalam kolaborasi. Tasks dan tools merupakan dua hal yang saling mempengaruhi.

1.5.2.1.4 Jenis-Jenis Kolaborasi

Kolaborasi juga memiliki jenis-jenis dalam klasifikasinya yaitu:

1. Kolaborasi Primer.

Ciri utama dari kolaborasi primer adalah bahwa kelompok atau individu sungguh-sungguh dilebur menjadi satu. Menurut Ahmadi, dalam kolaborasi primer berisikan seluruh kehidupan dari pada individu, dan masing-masing saling mengejar pekerjaan, demi kepentingan seluruh anggota dalam kelompok itu. Contohnya adalah kehidupan rutin sehari-hari dalam bicara, kehidupan keluarga pada masyarakat primitif dan lain-lainnya.⁵³ Kolaborasi dalam tipe ini terbentuk secara wajar di dalam kelompok-kelompok yang disebut kelompok primer. Di dalam kelompok-kelompok terdapat individu-individu cenderung membaurkan diri dengan sesamanya di dalam kelompok, dan masing-masing berusaha menjadi bagian dari kelompoknya. Menurut Narwoko ciri utama jenis kolaborasi seperti ini adalah kelompok-kelompok primer yang kecil dan bersifat tatap muka ini, orang-orang cenderung lebih senang bekerja dalam tim selaku anggota tim dari pada bekerja sebagai perorangan.⁵⁴

2. Kolaborasi Sekunder.

Apabila kolaborasi primer karakteristik dan masyarakat primitif, maka kolaborasi sekunder bercirikan sebaliknya. Kolaborasi sekunder adalah khas pada masyarakat modern. Menurut Ahmadi, Kolaborasi sekunder ini sangat diformalisasi dan spesialisasi, dan masing-masing individu hanya membangkitkan sebagian dari pada hidupnya kepada grup yang dipersatukan dengan itu. Sikap orang-orang di sini lebih individualistis dan mengadakan perhitungan-perhitungan.

3. Kolaborasi Tertier.

Berbeda halnya dengan tipe kolaborasi Primer dan Sekunder, Kolaborasi Tertier didasari oleh adanya konflik yang laten. Menurut Ahmadi Kolaborasi Tertier dilandasi oleh adanya sikap-sikap dari pihak-pihak yang melakukan

⁵⁴ Narwoko J Dwi. (2004). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta. Penerbit Prenada Media Group.hlm: 38

kolaborasi adalah murni oportunistik. Organisasi mereka sangat longgar dan gampang pecah. Bila alat bersama itu tidak lagi membantu masing-masing pihak dalam mencapai tujuannya.

1.5.2.1.5 Kendala Kolaborasi

Menurut pendapat Gray kolaborasi tidak selalu berjalan dengan lancar terdapat kendala atau hambatan yang sering ada. Berikut ini merupakan kendala yang ada dalam kolaborasi diantaranya:⁵⁵

1. Komitmen yang bertentangan dengan kolaborasi.
2. Sejarah permusuhan yang dilandasi perbedaan ideologi dalam waktu lama.
3. Kondisi dimana kebijakan tidak memperhatikan alokasi sumber daya.
4. Perbedaan persepsi atas risiko.
5. Kerumitan bersifat teknis.
6. Budaya kelembagaan dan politik.
7. *Unilateral action* (satu pihak memiliki power melakukan aksi sepihak).

Dalam perkembangan lebih lanjut, mekanisme kerja sama tidak hanya diterapkan pada situasi yang sifatnya “*emergency*” saja tetapi juga pada pengaturan kerja sama untuk membeli jenis-jenis pelayanan tertentu dari perusahaan swasta atau dari pemerintah lain. Menurut Henry, kerjasama yang dilakukan antar Pemerintah Daerah semula lebih ditujukan pada beberapa hal berikut:

1. Kegiatan tunggal.
2. Berkenaan dengan pelayanan ketimbang fasilitas.
3. Tidak bersifat permanen.
4. Sebagai “*stand-by provision*” yang baru dilaksanakan bila kondisi tertentu terjadi, dan
5. Diperkenankan/diizinkan oleh badan legislatif.⁵⁶

⁵⁵ Badan Diklat DIY <http://diklat.jogjapro.go.id>

⁵⁶ Henry, N. (1995). *Public Administration and Public Affairs*. Sixth Edition. (Englewood Cliffs, N.J. Prentice)

1.5.2.2 *Stakeholder*

1.5.2.2.1 Definisi *Stakeholder*

Pada dasarnya konsep *stakeholder* ini muncul untuk mengklasifikasikan dan mengevaluasi kinerja dari organisasi. Menurut pendapat Freeman pemahaman mengenai hubungan antara kelompok dipengaruhi oleh organisasi, seperti sarana analisis efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan. Konsep ini telah diperdebatkan dalam literatur fungsi-fungsi manajemen strategis, seperti perencanaan perusahaan, kinerja, teori sistem dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Sedangkan secara umum Stakeholder merupakan sebuah frasa yang terdiri dari dua kata, yaitu “*stake*” dan “*holder*”. Kata “*stake*” dapat diartikan sebagai “kepentingan”, sedangkan kata “*holder*” dapat diartikan sebagai “pemegang”. Jadi stakeholder artinya adalah pemegang kepentingan. Secara garis besar konsep stakeholder secara umum dapat didefinisikan sebagai “individu atau organisasi atau kelompok baik profit maupun non-profit yang memiliki kepentingan dengan perusahaan sehingga dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan itu sendiri.”⁵⁷

Beberapa ahli memiliki pendapat lain mengenai pengertian stakeholder seperti Pendapat yang diungkapkan oleh Gibson mengatakan bahwa stakeholder adalah Kelompok-kelompok atau individu yang berinteraksi dan memiliki ketergantungan dengan organisasi atau individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan, keputusan, kebijakan, praktik-praktik, atau tujuan organisasi.

Menurut Cragg mengatakan bahwa stakeholder merupakan Individu atau kelompok yang memiliki kepentingan sehingga terpengaruh secara negatif maupun positif.

⁵⁷ Fitri Handayani, Hardi Warsono. (2016). *Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Diakses Pada 15 Maret 2019 Pukul 22.10 Melalui <https://media.neliti.com/media/publications/183052-ID-analisis-peran-stakeholders-dalam-pengem.pdf>

Pendapat lain dikatakan oleh Philips yang mengatakan bahwa *stakeholders* dibagi menjadi dua berdasarkan tujuan adanya *stakeholders* yaitu:⁵⁸

- (1) *Stakeholder* Normatif yaitu untuk manfaat yang harus dikelola oleh perusahaan.
- (2) *Stakeholder* Turunan, yaitu untuk mempengaruhi organisasi dan stakeholder norma.

Sedangkan berdasarkan pendapat dari Mahoney *stakeholder* sendiri dibagi menjadi dua bagian yaitu stakeholder pasif dimana stakeholder pasif memiliki klaim moral di sebuah perusahaan untuk tidak melanggar kebebasan atau menimbulkan kerugian, sedangkan stakeholder aktif merupakan stakeholder yang memiliki klaim hak untuk dipenuhi kesejahteraannya.⁵⁹

Menurut buku karya L. Friedman and Samantha Miles mengungkapkan bahwa konsep stakeholder mengakui bahwa dalam organisasi apapun, terdapat berbagai individu atau kelompok yang mendukung atau mempengaruhi suatu organisasi dimana stakeholder menjadi alat dalam mencapai tujuan organisasi.

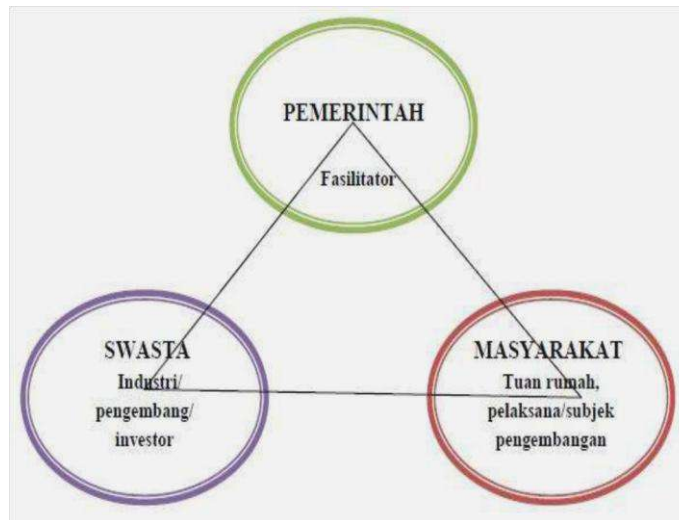
Definisi lain diungkapkan oleh *Stanford Research Institute* yang mengatakan bahwa *stakeholder* dalam arti luas dapat diartikan sebagai individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi. Artinya individu atau kelompok yang menganggap dirinya sebagai stakeholder dari sebuah organisasi merasa dirinya menjadi pemangku kepentingan yang dapat dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan pemaparan para ahli tentang definisi *stakeholder* di atas, peneliti menyimpulkan bahwa stakeholder merupakan individu dan/atau kelompok yang memiliki interaksi dan ketergantungan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dipengaruhi oleh tindakan, keputusan, kebijakan, praktik-praktik, atau tujuan organisasi.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Andrew L. Friedman and Samantha Miles. (2006). *Stakeholders Theory and Practice*. Publisher SPI. Great Britain . Hlm 5-8

Setelah di uraikan mengenai konsep stakeholder yang perlu kita ketahui ialah dalam pengembangan pariwisata ada beberapa pihak yang memiliki peran dan terlibat langsung dalam kegiatan kepariwisataan. Berikut gambar yang menggambarkan ilustrasi pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata atau pemangku kepentingan berdasarkan pendapat Sunaryo (2013).⁶⁰



Gambar 1.3 Pemangku Kepentingan dalam Pariwisata

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam pelaksanaan kepariwisataan sangatlah besar dan perlu diseimbangkan dengan peran pemerintah maupun swasta. Tetapi dalam kenyataannya yang terjadi peran masyarakat masih sangat kecil bila dibandingkan dengan kedua stakeholder lainnya. Penyebabnya adalah tidak adanya atau lemahnya akses yang mereka miliki kepada sumber daya (*resource*) pariwisata yang ada dan rendahnya pelibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan Konsep stakeholder sendiri muncul pada tahun 1963 yang dikenalkan oleh *Stanford Research Institute*, yang mendefinisikan bahwa *stakeholder* adalah kelompok-kelompok yang tidak ada jika tanpa dukungan organisasi.

Penggunaan kata *stakeholder* mengacu pada partisipasi warga negara sebagai individu dan partisipasi kelompok yang terorganisir. Disamping itu

⁶⁰ Alviya Iis, Suryabdari Elvinda, Mariani Retno, Dan Muttaqin Zahrul. (2016). *Meningkatkan Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Wilayah Daerah Aliran Sungai Ciliwung*. Jurnal Penelitian Sosial Dan Kehutanan. Vol.13.No2.

penggunaan kata stakeholder juga mengacu pada keterlibatan organisasi publik dan organisasi non publik yang mana organisasi publik tersebut mempunyai peran kepemimpinan yang khusus dalam proses *collaborative governance*. Dalam konteks penelitian ini, pengembangan pariwisata dilakukan oleh stakeholders atau pemangku kepentingan yang merupakan pemerintah, BUMN, dan masyarakat yang terlibat dalam identifikasi peluang infrastruktur, membangun hubungan yang lebih baik dalam pengembangan wisata Umbul Ponggok, memanfaatkan peluang ekonomi, dan memecahkan beragam tantangan lainnya dalam pengembangan pariwisata yang ada di Umbul Ponggok.

Dalam pengembangan wisata umbul ponggok *collaborative governance* terlihat dari adanya kolaborasi antar aktor yaitu pemerintah (Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Pariwisata maupun Pemerintah desa), masyarakat sekitar wisata Umbul ponggok , serta pihak swasta yang sebagai mitra. Peran pemerintah dalam pengembang wisata ini sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaku wisata. Sedangkan swasta sebagai mitra untuk membantu dalam mengatasi masalah dan kendala pengembangan wisata serta sebagai motivator yang menggerakkan masyarakat melalui pembinaan. Terdapat mitra yang membina para masyarakat sekitar wisata Umbul ponggok melalui berbagai bantuan serta pelatihan dalam pengembangan pariwisata umbul ponggok.

Stakeholder dalam penelitian ini terdiri dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintahan Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri, Bank BNI46, Kelompok Sadar Wisata Wanua Tirta, masyarakat sekitar Wisata Umbul Ponggok. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diklasifikasikan *stakeholder* dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintahan Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo diklasifikasikan sebagai stakeholder jenis *dominant stakeholder*. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten merupakan lembaga yang memiliki kekuatan dan legitimasi yang kuat.

2. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tirta Mandiri diklasifikasikan sebagai stakeholder jenis *definitive stakeholder*. Hal tersebut dikarenakan Bumdes tirta mandiri sebagai pengelola Wisata Umbul Pongkok.

3. Kelompok Sadar Wisata Wanua Tirta dan Masyarakat di sekitar Wisata Umbul Pongkok diklasifikasikan sebagai stakeholder jenis *dependent stakeholder*. Hal ini dikarenakan hampir seluruh masyarakat desa pongkok ikut berpartisipasi dalam pengembangan potensi umbul pongkok dengan cara ikut berinvestasi dalam program yang dibuat pemerintah desa seperti menyewa stand jualan makanan serta membuat produk olahan yang menjadi oleh-oleh untuk wisatawan .

1.5.2.2.2 Peran *Stakeholders*

Menurut Nugroho *stakeholders* dalam program pembangunan diklasifikasikan berdasarkan peranannya antara lain:

1. *Policy Creator* yaitu *stakeholder* yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan.
2. Koordinator yaitu *stakeholder* yang berperan untuk berkoordinasi dengan *stakeholder* lain yang terlibat dalam kolaborasi.
3. Fasilitator yaitu *stakeholder* sebagai fasilitator yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran.
4. Implementer yaitu *stakeholder* pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran.
5. Akselerator yaitu *stakeholder* yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.⁶¹

1.5.2.2.3 Jenis-Jenis *Stakeholders*

Secara umum, *stakeholder* dapat dibedakan menjadi dua, (1) *stakeholder internal*, yakni pihak yang berasal dari dalam perusahaan atau organisasi dan secara langsung terlibat dalam kegiatan organisasi dan yang (2) *stakeholder*

⁶¹ *Ibid.*

eksternal, yakni pihak yang tidak termasuk dalam struktur organisasi dan tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan organisasi. Menurut buku *WWF (Wild World Funding)* yang berjudul “*Stakeholder Collaboration: Building Bridges for Conservation*”, terdapat empat jenis stakeholder dalam kolaborasi, yaitu sebagai berikut:

1. *Stakeholder Primer (Primary Stakeholder)*

Stakeholder primer merupakan pemangku kepentingan yang memiliki kekuatan, kekuasaan, tanggung jawab, dan klaim atas sumber daya. *Stakeholder* primer mencakup kelompok masyarakat lokal, sektor swasta, instansi lokal dan nasional. *Stakeholder* primer ini juga mencakup individu atau kelompok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi hasil kolaborasi, yakni politisi dan pejabat, serta organisasi internasional yang mengontrol kebijakan, hukum, dan sumber-sumber pendanaan.

2. *Stakeholder Sekunder (Secondary Stakeholder)*

Stakeholder sekunder adalah mereka yang memiliki kepentingan langsung pada hasil kolaborasi, misalnya operator wisata yang ingin mengetahui apakah tujuan ekowisata akan terus dapat diakses. Para stakeholder tersebut perlu dilibatkan dalam proses kolaborasi, namun peran mereka tidak seaktif stakeholder primer, sehingga keterlibatan *stakeholder* sekunder cenderung berkala.

3. *Stakeholder Oposisi (Opposition Stakeholder)*

Stakeholder oposisi merupakan *stakeholder* yang memiliki kapasitas untuk merugikan organisasi melalui pengaruh dan sumber daya yang mereka miliki.

4. *Stakeholder yang terpinggirkan (Marginalized Stakeholder)*

Stakeholder yang terpinggirkan dapat mencakup perempuan, masyarakat adat, masyarakat miskin, atau stakeholder primer, sekunder, dan oposisi yang tidak memiliki pengakuan atau kapasitas untuk berpartisipasi dalam upaya kolaborasi.⁶²

⁶² Fairuza, Mia. (2017). *Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pembangunan Inklusif Pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah Di Kabupaten Banyuwangi)*. Vol 5. No3.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Mitchell et al. yang mengidentifikasi *stakeholder* berdasarkan hubungan 3 atribut yaitu :

1. Kekuatan (*Power*)

Kekuatan didefinisikan sebagai kepemilikan sumber daya atau kemampuan untuk menyebabkan efek yang diinginkan.

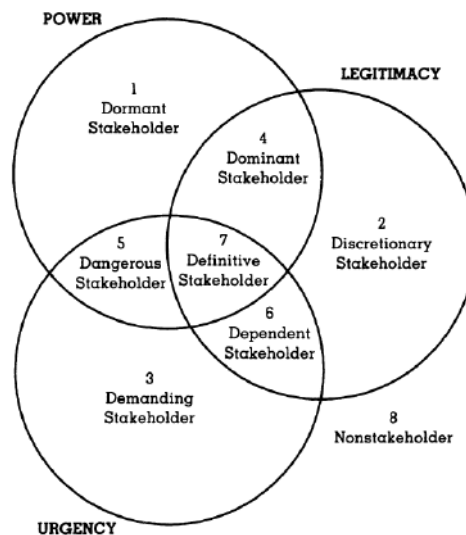
2. Legitimasi (*Legitimated*)

Legitimasi didefinisikan sebagai pengakuan sosial, dan kepentingan didefinisikan sebagai klaim waktu yang rentan atau signifikan (menuntut perhatian yang sesegera mungkin).

3. Kepentingan (*Urgency*)

Urgency (keadaan yang mendesak) adalah derajat ketika stakeholder menuntut untuk diberikan perhatian yang sesegera mungkin.

Melalui kombinasi atribut tersebut, diharapkan dapat membentuk ciri khas (*salience*) perusahaan atau organisasi. Selain itu Mitchell et al juga menjabarkan mengenai tipologi *stakeholder* berdasarkan atribut kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan, yaitu:⁶³



Gambar 1.4 Stakeholder Salience menurut Mitchell et al

⁶³*Ibid.*

Menurut Mitchel et al. menjabarkan tipologi stakeholder berdasarkan atributnya, yaitu:⁶⁴

1. Kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan, yaitu *Latent stakeholder* merupakan tipologi stakeholder yang memiliki satu atribut, antara lain:
 - (a) *Dormant Stakeholder (Power)* adalah *stakeholder* yang memiliki daya kuasa untuk memaksakan kehendaknya namun tidak memiliki pengakuan sosial dan kepentingan yang relevan.
 - (b) *Discretionary Stakeholder (Legitimacy)* adalah *stakeholder* yang memiliki pengakuan sosial namun tidak memiliki daya kuasa dan kepentingan mereka tidak dianggap penting oleh organisasi.
 - (c) *Demanding Stakeholder (Urgency)* adalah *stakeholder* yang menuntut dan mendesak organisasi namun tidak memiliki daya kuasa untuk mempengaruhi organisasi dan tidak diakui oleh masyarakat.
2. *Expectant Stakeholder* merupakan tipologi *stakeholder* yang memiliki kombinasi antara dua atribut, antara lain:
 - (a) *Dominant Stakeholder (Power dan Legitimacy)* adalah *stakeholder* yang memiliki sumber daya dan pengetahuan untuk mempengaruhi organisasi dan diakui secara sosial.
 - (b) *Dependent Stakeholder (Legitimacy dan Urgency)* adalah *stakeholder* yang memiliki legitimasi dan kepentingan mendesak, namun membutuhkan aktor lain yang memiliki power untuk mewujudkan tuntutanannya.
 - (c) *Dangerous Stakeholder* adalah *stakeholder* yang dapat menjalankan kekuasaan dan kepentingan yang mendesak namun tidak diakui secara sosial. Para *stakeholder* ini dapat mendesak organisasi dengan cara yang koersif.
3. *Definitive stakeholder* merupakan tipologi *stakeholder* yang memiliki ketiga atribut, sehingga memiliki kadar *salience* tertinggi. *Stakeholder* ini akan sangat mendominasi dan mendapatkan perhatian yang lebih dari organisasi karena seringkali berpengaruh secara signifikan terhadap performa organisasi.

⁶⁴ *Ibid.*

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diklasifikasikan *stakeholders* dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klaten diklasifikasikan sebagai *stakeholder* jenis *dominant stakeholder*. Hal ini dikarenakan Pemda Kabupaten Klaten merupakan lembaga yang memiliki kekuatan dan legitimasi yang kuat.
2. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tirta Mandiri diklasifikasikan sebagai *stakeholder* jenis *definitive stakeholder*. Hal tersebut dikarenakan Bumdes tirta mandiri sebagai pengelola wisata umbul ponggok melalui Pt umbul ponggok yang dibentuk. Dengan adanya Pt tersebut pengelolaan wisata umbul ponggok dipegang oleh bumdes sehingga membuat lembaga ini kuat.
3. Kelompok Masyarakat Wisata Umbul Ponggok diklasifikasikan sebagai *stakeholder* jenis *dependent stakeholder*. Hal ini dikarenakan hampir seluruh masyarakat desa ponggok ikut berpartisipasi dalam pengembangan potensi umbul ponggok dengan cara ikut berinvestasi dalam program yang dibuat pemerintah desa seperti menyewa stand jualan makanan serta membuat produk olahan yang menjadi oleh-oleh untuk wisatawan .

1.5.3 Kolaborasi *Stakeholder* dalam Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata adalah suatu proses, perbuatan atau cara dalam upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam yang dapat dinikmati oleh individu untuk sementara waktu atau beberapa waktu yang tidak dapat ditentukan. Dalam mengembangkan pariwisata terdapat faktor-faktor yang mendukung dalam pengembangan pariwisata. Menurut Clare A. Gunn dalam bukunya yang berjudul *Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases* terdapat yang memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana mengembangkan suatu pariwisata.

Faktor pendukung yang dimaksud adalah Sumber daya alam, pihak swasta, biaya atau keuangan, sumber daya manusia, masyarakat, kebijakan pemerintah, masyarakat dan organisasi.⁶⁵

⁶⁵ Islamiyah Wahyuni. (2018). *Studi Eksploratif tentang Faktor-Faktor Pendukung Pengembangan Kawasan Wisata Religi Makam KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Kabupaten Jombang*. Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol.6 No.3.

Lebih jauh dikatakan oleh Clare A. Gunn yang dikutip oleh wahyuni bahwa pengembangan pariwisata tentunya tidak hanya mengacu pada faktor-faktor pendukung pariwisata tetapi dibutuhkan kerja sama antar instansi ataupun lembaga yang terlibat dalam mendukung pengembangan tersebut. Tujuan dari kerja sama tersebut untuk mencapai tujuan dalam pengembangan pariwisata.⁶⁶

Konsep kolaborasi *stakeholders* adalah suatu proses yang melibatkan pihak-pihak atau individu atau dan kelompok yang memiliki wewenang yang saling berinteraksi untuk menciptakan suatu aturan atau kebijakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Pernyataan bahwa keberadaan pengembangan pariwisata sangat membutuhkan suatu kerja sama antar pemilik kepentingan diungkapkan oleh Claire A. Gunn yang mengatakan bahwa dalam pengembangan suatu pariwisata memerlukan kerja sama publik, privat dan masyarakat local agar segala harapan stakeholders bisa terpenuhi.⁶⁷ Kemudian pendapat Claire A. Gunn tersebut didukung pendapat yang diungkapkan oleh Mansyar Abdul bahwa menurutnya melalui kerja sama dengan kolaborator swasta dan masyarakat, pengembangan dan pengelolaan suatu pariwisata dapat dilakukan dengan cepat dan meminimalkan penggunaan anggaran pemerintah daerah.⁶⁸

Hal senada juga dikatakan oleh Clements et al. yang dikutip oleh Mason mengatakan bahwa suatu kolaborasi sangat penting dikembangkan dalam pariwisata untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan dari suatu pariwisata memiliki kualitas yang tinggi dan keberhasilan pengembangan pariwisata juga tidak dapat terlepas dari aspek masyarakat.⁶⁹

Oleh Sebab itu keberhasilan suatu pengembangan ataupun pembangunan wisata tentu saja tidak hanya berasal dari satu peran stakeholders semata namun

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷ Marceilla Hidayat. (2011). *Strategi Perencanaan Dan Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis Jawa Barat)*. Journal Tourism And Hospitality Essentials (The), Vol. I, No. 1. Politeknik Negeri Bandung.

⁶⁸ Arviana Irmadella. (2017). *Model Kolaborasi Stakeholders dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Taman Bungkul Kota Surabaya*. Skripsi.Universitas Airlangga.Hlm:82

⁶⁹ Mason, Peter. (2003). *Tourism Impact, Planning and Management*. Oxford. Butterworth-Heinemann.Hlm: 192

dapat tercapai dengan adanya kerjasama para pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat maupun swasta. Hal inilah yang menjadikan peneliti ingin melakukan penelitian terkait bagaimana kolaborasi *stakeholders* dalam pengembangan Wisata Umbul Ponggok Kabupaten Klaten.

1.6 Definisi Konsep

Pada metode penelitian kualitatif konsep merupakan unsur terpenting yang digunakan oleh peneliti dalam menggambarkan sebuah fenomena abstrak yang terjadi secara alami. Menurut Sandu dan Muhammad Ali mengatakan bahwa konsep merupakan pengelompokan atau suatu generalisasi dari suatu fenomena tertentu sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama.⁷⁰

Hal yang berbeda dikatakan oleh Kerlingger yang berpendapat bahwa konsep adalah sebuah abstraksi yang bermakna pada suatu ide dari sesuatu yang nyata yang dibentuk dengan mengelompokkan suatu hal-hal secara khusus.⁷¹

Berdasarkan pendapat ahli diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa konsep adalah sebuah abstraksi dari suatu fenomena alami yang dikelompokkan atau di generalisasi untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Konsep sangat diperlukan oleh peneliti agar dapat membandingkan definisi yang telah dipakai dalam dunia ilmiah dan kemudian menghubungkan definisi-definisi tersebut sesuai dengan tujuan ilmiah yang dimaksud.

1. Pengembangan adalah suatu proses, perbuatan atau cara dalam upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya dengan keinginan untuk memperbaiki kondisi secara spesifik untuk mencapai tujuan yang akan diinginkan.
2. Pariwisata adalah serangkaian aktivitas perjalanan ke suatu tempat yang ingin dituju untuk sementara waktu dengan alasan tidak ingin menetap melainkan

⁷⁰ Siyoto, Sandu & Sodik Ali. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta. Penerbit Literasi Media Publishing. Hlm: 12-13

⁷¹ Azwar, Saifuddin. (2010). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm: 35

hanya ingin menghabiskan waktu luang serta melakukan kegiatan yang berhubungan dengan alam.

3. Pengembangan Pariwisata adalah suatu proses, perbuatan atau cara dalam upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam yang dapat dinikmati oleh individu untuk sementara waktu atau beberapa waktu yang tidak dapat ditentukan.
4. Kolaborasi adalah proses kerja sama antar para aktor yang memiliki wewenang untuk memecahkan masalah secara bersama-sama dengan cara berkoordinasi melalui komunikasi untuk meningkatkan komitmen dari lembaga publik maupun stakeholder non pemerintah.
5. *Stakeholder* merupakan individu dan/atau kelompok yang memiliki interaksi dan ketergantungan dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau dipengaruhi oleh tindakan, keputusan, kebijakan, praktik-praktik, atau tujuan organisasi.
6. Kolaborasi *Stakeholder* adalah suatu proses yang melibatkan pihak-pihak atau individu atau dan kelompok yang memiliki wewenang yang saling berinteraksi untuk menciptakan suatu aturan atau kebijakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

I.7 Metodologi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk memperoleh gambaran, pengetahuan, pemahaman, serta dapat menjelaskan fenomena sosial yang terjadi. Maka dari itu, metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Alasan penggunaan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini karena peneliti berusaha untuk mendeskripsikan suatu fenomena dari bagaimana kolaborasi antar *stakeholder* dalam pengembangan potensi Wisata Umbul Ponggok di Kabupaten Klaten.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Creswell metode penelitian kualitatif merupakan metode yang mengandalkan data yang berupa teks dan gambar dalam analisisnya memiliki langkah-langkah unik serta memiliki sumber

dari strategi penelitian yang berbeda-beda.⁷² Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti berharap dapat memperoleh berbagai bentuk data untuk memperdalam wawasan mengenai kolaborasi antar *stakeholder* dalam mewujudkan pengembangan potensi Wisata Umbul Ponggok yang ada di Kabupaten Klaten, sehingga data yang didapat kredibel dan bermakna untuk mencapai tujuan penelitian.

I.7.1 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Ciri-ciri pendekatan kualitatif yaitu fokus pada proses yang interaktif, kebenaran dan keaslian adalah faktor kunci, nilai-nilai hadir secara eksplisit, teori dan data menyatu, *situationally constrained*, sedikit kasus dan subjek, analisis tematik, peneliti terkait dalam penelitian.⁷³ Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk meneliti kebenaran dan keaslian pada fenomena yang merupakan hasil konstruksi sosial-budaya dan merupakan proses yang interaktif.

1.7.2 Tipe Penelitian

Menurut Neuman dalam bukunya *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches* tipe penelitian digolongkan empat kategori, yaitu tipe penelitian berdasarkan kegunaan dan audiensi, tipe penelitian berdasarkan tujuan penelitian, tipe penelitian berdasarkan jenis kasus, dan tipe penelitian berdasarkan waktu. Tipe penelitian yang peneliti gunakan adalah tipe penelitian yang didasarkan pada tujuan penelitian. Tipe penelitian yang didasarkan pada tujuan penelitian dibagi lagi ke dalam tiga jenis, yaitu eksploratif, deskriptif, dan eksplanatif. Peneliti pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Tujuan utama penelitian deskriptif adalah untuk “melukis gambar” menggunakan kata atau angka dan untuk menyajikan profil, klasifikasi jenis, atau garis besar langkah untuk menjawab pertanyaan seperti siapa, kapan, di mana, dan

⁷² Crewel, John W. (2014). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm: 245

⁷³ Neuman, Lawrence W. (2014). *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Indonesia: Pearson Education, Hlm: 17.

bagaimana. Penelitian deskriptif menyajikan gambaran detail spesifik dari situasi, latar sosial, atau hubungan.⁷⁴ Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif yang tujuannya untuk menyajikan gambaran mengenai kolaborasi stakeholders dalam pengembangan Wisata Umbul Ponggok di Kabupaten Klaten.

I.7.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian dilakukan. Penentuan lokasi dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive* yang ditentukan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian. Penelitian akan dilakukan di Desa Ponggok dikarenakan beberapa pertimbangan seperti Desa Ponggok merupakan desa yang mampu bangkit dari desa yang miskin menjadi desa yang mandiri karena mampu mengembangkan pariwisata Umbul ponggok yang mampu menghasilkan PAD desa tertinggi di Kabupaten Klaten, kedua Desa Ponggok pernah mendapatkan penghargaan Desa Wisata Terbaik dengan kategori pemberdayaan masyarakat oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

I.7.4 Teknik Penentuan Informan

Informan merupakan orang yang memberi informasi berkaitan dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti baik data yang bersifat primer maupun sekunder. Pandangan dari Lincoln dan Guba, manfaat informan dalam penelitian adalah sebagai *sampling internal* untuk membantu mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dalam waktu yang relatif singkat. Dalam penelitian kualitatif, peneliti secara sengaja (*purposive*) memilih partisipan atau lokasi (dokumen atau materi visual) yang akan membantu peneliti untuk memahami permasalahan dan pertanyaan penelitian.⁷⁵ Informan dalam penelitian lapangan adalah orang-orang yang mengembangkan hubungan dengan peneliti dan orang-orang yang bercerita atau menginformasikan kondisi lapangan (penelitian).

⁷⁴ *ibid*, hlm: 21.

⁷⁵ Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). London: Sage Publication. Hlm: 166.

Dari uraian di atas, peneliti secara *purposive* memilih informan-informan penelitian beberapa pihak yaitu pihak pemerintah yang terdiri dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri. Kemudian dari kelompok masyarakat yang terdiri dari Komunitas Sadar Wisata Wanua Tirta dan masyarakat sekitar wisata umbul ponggok, dari pihak swasta terdiri dari Bank BNI46 Klaten.

Informan dari Kelompok Pemerintah, terdiri dari:

1. Mbak Sari selaku Sekretaris Bumdes Tirta Mandiri. Wawancara dilakukan pada tanggal 9 Juli 2019 pukul 11.10 WIB di ruang tunggu tamu Kantor Desa Ponggok.
2. Bapak Junaidi S.H selaku Kepala Desa Ponggok. Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Juli 2019 pukul 19.13 WIB di ruang tamu keluarga rumah pribadi bapak Junaidi.
3. Bapak Yani Setiadi S,sos selaku Sekretaris Desa Ponggok. Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 09.47 WIB di ruang kerja sekretaris desa.
4. Bapak Ahmad Susanto selaku Kasi Destinasi Wisata, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Wawancara dilakukan pada tanggal 29 Juli 2019 pukul 08.25 WIB di ruang kerja kasi destinasi wisata.
5. Bapak Fery Adiatmaja selaku Kasi Bagian Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Wawancara dilakukan pada tanggal 29 Juli 2019 Pukul 10.00 WIB di ruang kerja kasi bagian Desa.
6. Bapak Sri Mulyono selaku HRD Bumdes Tirta Mandiri dan ketua BPD Desa Ponggok. Wawancara dilakukan pada tanggal 29 Juli 2019 pukul 08.25 WIB di ruang tunggu kantor Desa Ponggok.
7. Bapak Suyamto Selaku Sekretaris Camat Kecamatan Polanharjo. Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 08.44 WIB di ruang kerja sekretaris camat.

Informan dari pihak Swasta, terdiri dari :

- Bapak Triyanto selaku Supervisor Pemasaran BNI46 Klaten. Wawancara dilakukan Pada Tanggal 29 Juli 2019 pukul 12.15 WIB di ruang tunggu tamu kantor BNI46 Klaten.

Informan dari Kelompok Masyarakat, terdiri dari:

1. Bapak Tryono selaku Ketua Pokdarwis Wanua Tirta Ponggok. Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 18.54 WIB di gazebo wisata Umbul Sighedang.
2. Ibu Lastri selaku wisatawan asal Sukoharjo. pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 13.32 WIB
3. Bapak Candra selaku Juru Parkir Mobil. Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Juli pukul 15.22 WIB ditempat parkir mobil Rt 02.
4. Ibu Eni selaku Pedagang Bakso. Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 12.11 WIB di warung Bakso Jepang.
5. Ibu Sri selaku Pedagang Makanan. Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Juli 2019 pukul 09.45 WIB di warung “Bu Sri” area Wisata Umbul Ponggok.
6. Bapak Ahmad selaku Penjaga Toilet. Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Juli 2019 pukul 08.45 WIB di area Wisata Umbul Ponggok
7. Mas Bayu selaku Pekerja Freelance. Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 09.53 WIB di area Wisata Umbul Ponggok
8. Bapak Ari selaku Ketua Rt 01. Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Juli 2019 pukul 08.11 WIB di ruang tamu kediaman Bapak Ari.
9. Bapak Ari selaku wisatawan asal Pekalongan. Wawancara dilakukan pada tanggal 17 Juli 2019 pukul 11.00 WIB di area Wisata Umbul Ponggok.
10. Ibu Lastri selaku wisatawan asal Weru. Wawancara dilakukan pada tanggal 17 Juli 2019 pukul 13.00 WIB di area Wisata Umbul Ponggok.
11. Bapak Ahmad selaku wisatawan asal Bandung. Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Juli 2019 pukul 14.30 WIB di area Wisata Umbul Ponggok.

12. Bapak Agung selaku Warga RT 06. Wawancara dilakukan pada tanggal 17 Juli pukul 16.23 WIB di area Wisata Umbul Sigidang.

I.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan berbagai bentuk data atau informasi dan melakukan pengamatan pada *natural setting* dalam waktu yang tidak sebentar. Menurut Creswell, prosedur pengumpulan data pada penelitian kualitatif dibagi menjadi empat tipe dasar, yaitu:⁷⁶

a. Observasi

Menurut Creswell, J.W, observasi kualitatif merupakan observasi yang dilakukan dengan cara peneliti langsung terjun ke lapangan guna mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Observasi yang dilakukan adalah observasi yang bersifat *open-ended* yaitu peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan-pandangan mereka. Pada penelitian ini, nantinya peneliti mengamati secara langsung bagaimana kolaborasi *stakeholders* dalam pengembangan Wisata Umbul Ponggok.⁷⁷ Mulai dari peran-peran *stakeholders* yang terlibat hingga dampak yang diberikan dari adanya kolaborasi *stakeholders* dalam pengembangan Wisata Umbul Ponggok.

b. Wawancara

Dalam wawancara kualitatif dari Creswell, J.W peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* dengan partisipan, melakukan wawancara melalui telepon atau media daring lainnya atau bahkan dalam *Focus Group interview* yang biasanya terdiri dari enam sampai delapan informan per kelompok. Pendekatan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini nantinya tentunya adalah wawancara mendalam (*in depth interview*) yang dilakukan peneliti guna memperoleh informasi kepentingan penelitian melalui dialog yang sifatnya

⁷⁶ *ibid*, hlm: 238-242.

⁷⁷ Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan campuran* (edisi revisi). Yogyakarta. Penerbit Pustaka Pelajar. Hlm :254

terbuka agar informan dapat berbicara sesuai dengan pandangan, pengetahuan dan pengalamannya tentang fenomena dari penelitian ini.

Dalam hal ini, wawancara difokuskan kepada Pemerintah Desa Ponggok yang mengetahui bagaimana kolaborasi antar *stakholders* dalam pengembangan Wisata Umbul Ponggok. Wawancara mendalam juga dilakukan kepada para *stekaholders* yang sudah ditentukan secara *purposive* terkait dengan pengembangan Wisata Umbul Ponggok.

c. Dokumentasi

Menurut Creswell, J.W, Pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan 2 cara yaitu dokumen publik dan dokumen pribadi. Dokumen publik dapat berupa makalah atau koran. Sedangkan, dokumen pribadi dapat berupa jurnal, buku harian dan surat.⁷⁸ Pada penelitian kali ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumentasi publik dan pribadi yang dimiliki oleh pengembang wisata Umbul ponggok. Dokumen-dokumen tersebut bisa berasal dari Pemerintah Desa Ponggok, maupun dari para *stakeholder* yang terlibat dalam pengembanagn Wisata Umbul Ponggok.

d. Materi Audio-Visual

Menurut Creswell, J.W, pengumpulan data melalui materi audio dan visual dapat diambil dalam bentuk foto, video, objek seni, rekaman suara, film dan software komputer. Pada penelitian ini, peneliti akan mendokumentasikan pengumpulan data dalam bentuk foto-foto selama proses penelitian dilakukan.⁷⁹

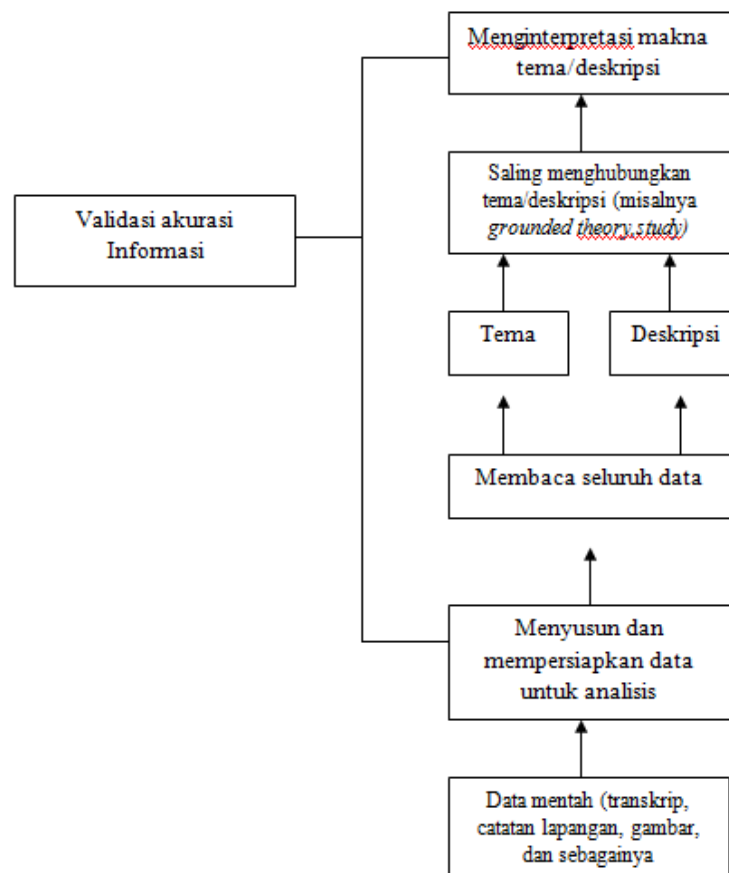
1.7.6 Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, baik melalui proses wawancara, observasi maupun dokumentasi maka proses selanjutnya yang perlu dilakukan dalam penelitian ini adalah menganalisis data yang sudah didapatkan oleh peneliti serta membuat kesimpulan dari hasil analisis data dan informasi tersebut.

⁷⁸ *Ibid.* Hlm: 256

⁷⁹ *Ibid.*

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang sudah didapat dari berbagai proses yang sudah dilakukan dalam mengumpulkan data. Analisis data mencakup menyusun data yang akan di analisis, membaca data yang akan dianalisis, saling menghubungkan tema atau deskripsi kemudian menginterpretasikan data analisis. Untuk lebih jelas mengenai susunan analisis data dapat dilihat pada gambar 1.2



Gambar 1. 5 Analisis Data Menurut Creswell J. W

Sumber: Creswell J. W. (2016). Hlm 253 (edisi revisi).

Validasi akurasi informasi dilakukan berdasarkan data mentah yang id dapat sewaktu peneliti turun lapangan, data ini bisa berupa transkrip wawancara, catatan lapangan, gambar objek observasi maupun data pendukung yang didapat dari dias terkait dalam pengembangan pariwisata.

Setelah data mentah didapat tahap selanjutnya menyusun data dengan cara memberikan penomoran pada hasil transkrip wawancara untuk memudahkan analisis nantinya.

Tahapan selanjutnya merupakan membaca seluruh data yang telah didapat dari hasil turun lapangan. Semua data yang telah didapat dan telah diberikan penomoran atau kode pada hasil transkrip. Dapat kita lakukan analisis sesuai dengan tahapan yang telah dilakukan.

Pada tema dan deskripsi peneliti berusaha untuk memberikan penjelasan mengenai bagaimana kolaborasi *stakeholders* dalam pengembangan wisata umbul pongok dengan fokus pada pengembangan pariwisata.

Tahapan berikutnya adalah tahapan menghubungkan *grand theory* untuk memastikan apakah kedua konsep yang kita gunakan memiliki kaitan satu sama lain dengan penelitian yang kita lakukan. Kemudian setelah kedua konsep penelitian berkaitan maka tahapan selanjutnya mennterprestasikan data kita agar dapat ditarik kesimpulan pada akhirnya.

1.7.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti mengacu pada Creswell J. W, yaitu Validitas dan Reliabilitas.⁸⁰

1.7.7.1 Validitas

Validitas pada penelitian kualitatif berbeda dengan validitas kuantitatif. Validitas kualitatif disini merupakan upaya pemeriksaan terkait akurasi pada hasil penelitian yang kita lakukan dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu. Penelitian dikatakan valid jika temuan yang didapatkan oleh peneliti bersifat akurat dari sudut pandang peneliti dan pembaca. Terdapat 8 validitas yang digunakan peneliti. Adapun 8 validitas tersebut yaitu:

⁸⁰ Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (edisi revisi). Yogyakarta.Penerbit Pustaka Pelajar.Hlm: 268-273

1. Menggunakan Triangulasi

Menggunakan triangulasi sumber data dan informasi dari beberapa sumber yang sudah didapatkan dapat membantu peneliti dalam menganalisis hasil temuan dilapangan. Sumber data yang peneliti peroleh berasal dari sumber data hasil wawancara, sumber data dari internet, sumber data dari buku.

2. Menerapkan Member *Checking*

Menerapkan *member checking* ini dilakukan dengan membawa kembali laporan akhir kepada informan guna mengecek kembali apakah laporan yang sudah ditulis tersebut sudah akurat. Lebih tepatnya, peneliti memiliki tugas yang mengharuskan peneliti melakukan wawancara kembali (tindak lanjut) dengan para informan dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkomentar mengenai hasil laporan penelitian.

3. Membuat *Thick Description*.

4. Memanfaatkan waktu yang relatif lama pada saat terjun ke lapangan.

Harapannya peneliti mampu memahami lebih detail terkait fenomena yang dikaji. Semakin banyak pengalaman yang dilalui peneliti bersama partisipan maka hasil penelitiannya semakin akurat.

5. Melakukan tanya jawab sesama rekan peneliti guna meningkatkan keakuratan hasil penelitian.

Proses ini dapat dilalui dengan cara mengharuskan peneliti mencari sesama rekan peneliti untuk berdiskusi mengenai penelitian kualitatif sehingga hasil penelitiannya dapat dirasakan oleh orang lain. Dalam artian, melibatkan interpretasi lain selain interpretasi dari peneliti itu sendiri.

1.7.7.2 Reliabilitas

Menurut Gibbs dalam Creswell J. W, bahwa reliabilitas kualitatif mengindikasikan bahwa peneliti telah menggunakan pendekatan secara konsisten

dan juga konsisten jika diterapkan oleh peneliti lain untuk proyek yang berbeda. Adapun beberapa prosedur reliabilitas yang dilakukan yaitu:⁸¹

1. Mengecek hasil transkrip dan memastikan tidak ada kesalahan dari transkrip tersebut.
2. Memastikan tidak adanya definisi dan makna yang mengambang mengenai kode-kode selama proses coding. Proses ini dilakukan dengan cara membandingkan data tentang kode dengan menulis memo tentang kode dan definisinya.
3. Pada penelitian yang dilakukan secara kelompok. Diskusikan kode bersama partner satu tim.
4. Melakukan cross-check pada kode-kode yang dikembangkan oleh peneliti lain dengan cara membandingkan hasil yang diperoleh.

⁸¹ *Ibid* .Hlm : 267